

KAJIAN EKONOMI

REGIONAL

TRIWULAN IV

2011

VISI BANK INDONESIA :

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

MISI BANK INDONESIA :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan”

KATA PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB dan Keuangan Daerah), Inflasi, Moneter dan Perbankan, Sistem Pembayaran, Kesejahteraan dan Perkiraan Perkembangan Ekonomi Daerah pada triwulan I-2012. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data dari instansi/lembaga terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran, dukungan penyediaan data dan informasi sangat diharapkan.

Pekanbaru, 8 Februari 2012

BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd



Hari Utomo
Pemimpin

TABEL INDIKATOR

EKONOMI TERPILIH

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2010	2011			
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Indeks Harga Konsumen :					
- Kota Pekanbaru	123,09	124,95	124,57	127,44	129,35
- Kota Dumai	129,96	129,64	129,24	132,55	133,98
Laju Inflasi Tahunan (yoy, %) :					
- Kota Pekanbaru	6,99	7,76	5,61	6,10	5,09
- Kota Dumai	9,05	8,49	5,42	5,78	3,10
PDRB - harga konstan (Rp juta)					
- Pertanian	4.327,99	4.168.691	4.276.631	4.429.704	4.432.205
- Pertambangan & Penggalian	12.027,16	11.816.362	11.853.094	11.953.407	12.264.091
- Industri Pengolahan	2.957,26	2.825.420	2.888.736	3.044.214	3.110.746
- Listrik, gas dan Air Bersih	54,75	55.540	57.505	59.567	58.434
- Bangunan	931,68	914.781	968.361	1.012.891	1.062.482
- Perdagangan, Hotel, dan restoran	2.333,78	2.316.010	2.417.986	2.553.129	2.622.699
- Pengangkutan dan Komunikasi	791,46	794.651	815.252	857.051	879.473
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	369,69	361.050	368.153	385.894	407.477
- Jasa	1.347,57	1.336.220	1.354.947	1.435.874	1.467.774
Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)	5,22	4,04	3,44	3,93	4,63
Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)	7,84	7,51	7,54	7,64	7,40

B. PERBANKAN

INDIKATOR (dalam Rp juta)	2010	2011			
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bank Umum					
Total Aset	49.827.487	54.448.513	58.275.407	59.370.445	59.752.476
DPK	37.030.585	40.058.712	42.396.619	43.980.255	44.920.105
- Giro	9.198.824	10.461.440	11.252.402	11.567.327	10.837.130
- Tabungan	18.436.699	18.358.629	19.361.097	20.142.350	22.342.860
- Deposito	9.395.063	11.238.643	11.783.121	12.270.578	11.740.115
Kredit - berdasarkan lokasi proyek	42.380.364	45.657.311	47.521.152	48.981.261	51.020.177
LDR - Lokasi Proyek (%)	114,45	113,98	112,09	111,37	113,58
Kredit	29.194.961	30.105.869	32.170.427	33.623.173	36.082.932
- Modal Kerja	10.703.526	10.700.169	11.445.668	11.939.534	12.729.875
- Investasi	7.871.765	8.294.291	8.838.182	9.199.610	10.207.813
- Konsumsi	10.619.670	11.111.409	11.886.578	12.484.028	13.145.244
- LDR (%)	78,84	75,15	75,88	76,45	80,33
- NPL (%)	2,33%	2,20%	2,16%	2,39%	1,95%
Kredit UMKM					
- Mikro	2.204.853	2.495.251	2.687.024	2.901.705	3.112.386
- Kecil	4.797.283	5.181.340	5.542.752	5.018.411	5.548.251
- Menengah	3.175.997	3.287.614	3.676.323	4.440.529	4.868.783
NPL MKM (%)	3,24%	3,14%	3,03%	3,13%	2,40%
BPR					
Total Aset	755.437	809.851	824.011	848.125	920.404
DPK	536.516	592.750	609.595	611.983	642.785
Kredit - berdasarkan lokasi proyek	515.234	539.622	564.385	584.447	617.548
Rasio NPL	7,98%	8,46%	7,95%	8,75%	8,22%
LDR	96,03%	91,04%	92,58%	95,50%	96,07%

*) SBH 2007

TABEL INDIKATOR

EKONOMI TERPILIH

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

INDIKATOR	2010	2011			
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
C. SISTEM PEMBAYARAN					
Posisi Kas Gabungan (Rp juta)	3.471.264	1.021.101	2.965.393	2.500.522	1.618.978
Inflow (Rp juta)	180.206	478.586	406.483	1.270.188	668.208
Outflow (Rp juta)	3.651.470	1.499.687	3.371.876	3.770.710	2.287.186
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	172.271	303.806	406.483	390.321	306.454
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	61.521	62.093	62.234	65.315	76.774
Volume Transaksi RTGS (lembar)	62.592	55.608	55.387	55.387	27.151
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	992	1.002	1.020	1.071	1.200
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)	1.010	897	908	908	424
Nominal Tolakan Cek/BG Kosong	116.788	129.679	131.245	131.245	146.297
Volume Tolakan Cek/BG Kosong	4.577	4.571	4.946	4.946	5.615
Rata-rata Harian Nominal Cek/BG Kosong	1.884	2.092	2.152	2.152	2.286
Rata-rata Harian Cek/BG Kosong	74	74	81	81	88

RINGKASAN EKSEKUTIF**I. GAMBARAN UMUM**

Perkembangan ekonomi Riau tumbuh menguat diluar perkiraan semula

Perkembangan ekonomi Riau triwulan IV-2011 secara umum menunjukkan hal yang menggembirakan, khususnya ditengah risiko pelemahan ekonomi global. Kondisi ini tercermin dari menguatnya pertumbuhan ekonomi yang berada diluar perkiraan semula disertai dengan tekanan inflasi yang terjaga selama triwulan laporan.

II. ASSESMENT MAKROEKONOMI REGIONAL

- Kinerja perekonomian Riau pada triwulan laporan mampu menunjukkan daya tahan yang kuat ditengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Riau secara tahunan mencapai 4,63% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2011 yang tercatat sebesar 3,93%, namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50% (yoy). Dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan pada triwulan IV tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2011 mencapai 5,01% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50%.
- Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, kinerja ekonomi Riau tumbuh sebesar 7,40% (yoy), relatif melambat baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan ini masih tergolong tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang tercatat sebesar 6,90% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan non migas Riau selama tahun 2011 mencapai 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang tercatat sebesar 6,90%.
- Dari sisi penggunaan, roda penggerak perekonomian berasal dari ekspor dan pembentukan modal tetap bruto serta masih kuatnya konsumsi. Kondisi ini diperkirakan tidak terlepas dari membaiknya ekspor migas, meskipun terdapat perlambatan pada ekspor non migas. Di sisi lain, masih berlangsungnya percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung PON ke-18 seperti Bandara SSK II, jembatan layang (*fly over*) dan gedung olahraga turut memberikan andil signifikan terhadap tingginya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan. Sementara itu, konsumsi masih memberikan sumbangan yang meningkat seiring membaiknya konsumsi pemerintah dan swasta.

Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV-2011 menunjukkan daya tahan yang kuat

Sumber pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV-2011 semakin berimbang, tercermin dari meningkatnya peran ekspor dan PMTB

- Pada sisi sektoral, sektor perdagangan tercatat menjadi penyumbang terbesar dalam memberikan daya dorong perekonomian Riau diikuti oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Relatif tingginya peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan Riau pada triwulan laporan diindikasikan dipengaruhi oleh percepatan belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah serta masih kondusifnya kegiatan ekspor-impor.

III. ASSES MEN INFLASI

- Dinamika perkembangan harga di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Tingkat inflasi, tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pekanbaru dan Dumai, mengalami kecenderungan yang menurun dan searah (konvergen) dengan tingkat inflasi nasional.
- Tekanan inflasi Riau pada akhir tahun 2011 mencapai 4,71% (yoy), menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya serta berada pada titik terendahnya selama tahun 2011. Meskipun mencatat angka yang rendah, namun inflasi Riau masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 3,79% (yoy) dan 3,98% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Provinsi Riau yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan bahan pangan dari wilayah sekitar.
- Berdasarkan kota yang disurvei, inflasi tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yakni sebesar 5,09% (yoy). Sementara, inflasi Kota Dumai pada akhir tahun tercatat sebesar 3,10% (yoy), jauh menurun bila dibandingkan dengan akhir tahun 2010 yang menyentuh level 9,05% (yoy).

Tekanan inflasi di Provinsi Riau pada akhir tahun 2011 berada pada tingkat yang rendah

IV. ASSESMENT KEUANGAN

- Kegiatan usaha perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sejalan dengan menguatnya perekonomian. Sejumlah indikator utama seperti aset, penghimpunan dana, kredit dan jaringan kantor juga terus menunjukkan peningkatan, diikuti dengan risiko kredit bermasalah yang relatif terjaga.
- Aset perbankan Riau pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp60,67 triliun atau tumbuh sebesar 19,95% (yoy). Kenaikan aset perbankan secara tidak langsung berasal dari peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang pada triwulan laporan mencapai Rp44,60 triliun atau tumbuh 21,28% (yoy). Kredit yang disalurkan oleh perbankan Riau pada triwulan laporan mencapai Rp34,21 triliun atau naik 23,53% (yoy). Lebih tingginya kenaikan kredit (yoy) dibandingkan dengan kenaikan DPK mendorong *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau per Desember 2011 mencapai 80,55%.
- Risiko kredit bermasalah (NPL gross) perbankan Riau pada triwulan laporan berada pada tingkat yang aman yakni sebesar 2,05%, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 2,42%.
- Realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp4,21 triliun atau sekitar 87,89% dari anggaran belanja APBD tahun 2011. Angka realisasi tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan rata-rata selama tiga tahun terakhir yang mencapai 87,87%.

Kegiatan usaha perbankan di Provinsi Riau tumbuh sebagaimana yang diharapkan

Realisasi belanja APBD Provinsi Riau pada akhir tahun 2011 mencapai 87,89%.

V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2012 diperkirakan akan tumbuh melambat meskipun berada pada tingkat yang moderat. Kondisi ini diindikasikan akan dipengaruhi oleh terbatasnya produksi tanaman perkebunan dan prakiraan kenaikan curah hujan yang berpotensi menghambat distribusi pasokan bahan baku khususnya pada sektor industri pengolahan kelapa sawit.

Perekonomian Riau pada triwulan I-2012 diproyeksikan tumbuh moderat

Tekanan inflasi berpotensi menggerus daya beli khususnya dalam dua bulan pertama tahun 2012

Sumber pertumbuhan diperkirakan berasal dari sektor sekunder dan tersier khususnya sektor bangunan dan perdagangan

- Dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2012 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,30%-4,50%. Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi yakni berkisar 7,30%-7,50%.
- Dari sisi penggunaan, kondisi ini bersumber dari melambatnya daya beli masyarakat sejalan dengan adanya tekanan inflasi khususnya dalam dua bulan pertama triwulan I-2012. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa terdapat peningkatan ekspektasi inflasi di tingkat konsumen dalam 3 bulan mendatang sejalan dengan faktor tingginya curah hujan yang berpotensi mengganggu pasokan bahan makanan.
- Meskipun demikian, pertumbuhan triwulan mendatang dipandang masih cukup kondusif sejalan dengan kebutuhan komoditas ekspor Riau (terutama CPO) di negara mitra dagang utama yang dapat memperkuat kinerja perdagangan eksternal. Disamping dipengaruhi oleh beberapa kondisi tersebut, relatif stabilnya bea keluar ekspor CPO diperkirakan akan mengakibatkan cukup kompetitifnya daya saing ekspor CPO Riau di pasar internasional.
- Sementara, dari sisi sektoral, sektor bangunan dan sektor perdagangan diindikasikan akan menjadi motor penggerak perekonomian Riau pada triwulan mendatang sejalan dengan masih berlangsungnya percepatan pembangunan infrastruktur PON. Sedangkan, pada sektor utama, khususnya sektor pertanian diperkirakan berpotensi tumbuh melambat pertumbuhan triwulan mendatang seiring dengan meningkatnya tingkat curah hujan pada triwulan mendatang yang dapat menghambat pasokan bahan baku ke sektor industri pengolahan non migas.
- Beberapa hal yang berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi Riau mencapai batas atas proyeksi (*upside risks*) antara lain insentif pemerintah melalui restrukturisasi bea keluar ekspor MSM serta meningkatnya APBD yang secara signifikan dapat memberi efek *multiplier* terhadap ekonomi melalui porsi belanja modal.

Tekanan inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan mencapai 4,10% - 4,40% (yoy)

- Sementara itu, tekanan inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan mendatang diproyeksikan berada pada kisaran 4,10% - 4,40% (yoy). Sedangkan secara triwulanan, inflasi diperkirakan berkisar 0,60% - 0,80% (qtq). Kondisi ini diindikasikan bersumber dari meningkatnya prakiraan harga bahan pangan strategis khususnya beras sejalan dengan gangguan cuaca yang berpotensi mengakibatkan produksi tidak optimal disamping belum masuknya siklus musiman panen gabah pada sentra produksi utama.
- Beberapa faktor lain yang diperkirakan akan mempengaruhi tekanan inflasi pada triwulan mendatang antara lain (i) masih kuatnya permintaan domestik sejalan dengan masih berlangsungnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung PON yang akan berlangsung pada bulan September 2012 mendatang, (ii) risiko gangguan distribusi pasokan terkait dengan belum membaiknya kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Riau, (iii) *trend* penguatan harga emas dunia yang berpotensi memberikan tekanan inflasi inti, dan (iv) meningkatnya ekspektasi inflasi di tingkat pedagang akibat gangguan produksi bahan pangan strategis pada sentra produksi utama.

Bab 1

KONDISI EKONOMI

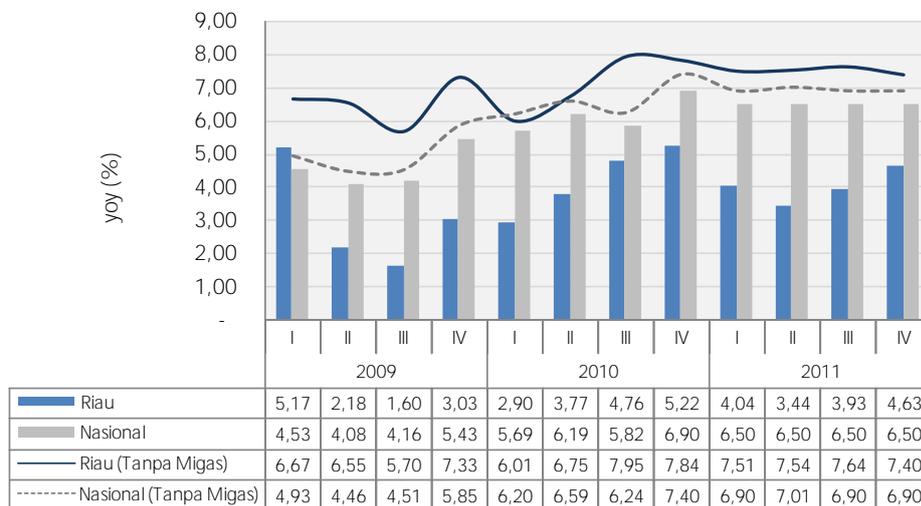
MAKRO REGIONAL

1. KONDISI UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan IV-2011 mampu menunjukkan daya tahan yang kuat ditengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Riau secara tahunan mencapai 4,63% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2011 yang tercatat sebesar 3,93% (yoy), namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50% (yoy). Dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan pada triwulan IV tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2011 mencapai 5,01% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50%.

Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, kinerja ekonomi Riau tumbuh sebesar 7,40% (yoy), relatif melambat baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan ini masih tergolong tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang tercatat sebesar 6,90%. Dengan demikian, pertumbuhan non migas Riau selama tahun 2011 mencapai 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang tercatat sebesar 6,90%.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional (yoy,%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari sisi penggunaan, roda penggerak perekonomian utamanya berasal dari ekspor dan pembentukan modal tetap bruto serta masih kuatnya konsumsi. Kondisi ini diperkirakan tidak terlepas dari membaiknya ekspor migas khususnya gas bumi. Di sisi lain, masih berlangsungnya percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung PON ke-18 seperti Bandara SSK II, jembatan layang (*fly over*) dan gedung olahraga turut memberikan andil signifikan terhadap pertumbuhan investasi triwulan laporan. Sementara itu, konsumsi masih memberikan sumbangan yang meningkat seiring membaiknya konsumsi pemerintah dan daya beli masyarakat.

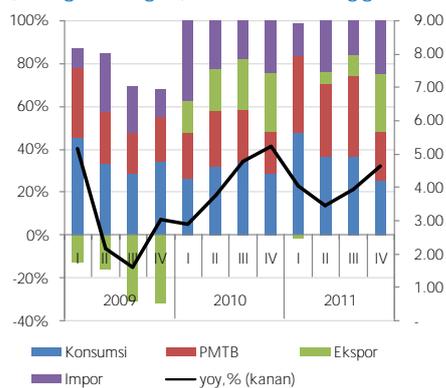
Sementara itu, dari sisi sektoral, sektor perdagangan tercatat menjadi penyumbang terbesar dalam memberikan daya dorong perekonomian Riau triwulan laporan

diikuti oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Relatif tingginya peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan Riau pada triwulan laporan diindikasikan dipengaruhi oleh percepatan belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dan masih kondusifnya kegiatan ekspor-impor, serta masih kuatnya konsumsi.

2. PDRB SISI PENGGUNAAN

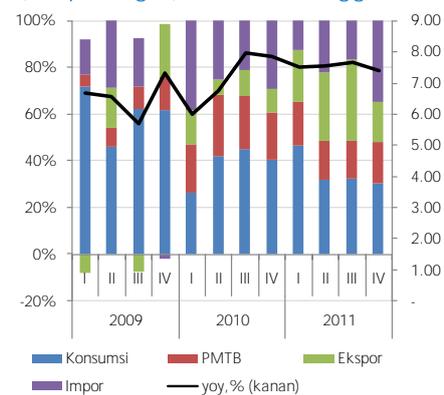
Kinerja perekonomian Riau, dari sisi penggunaan, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kondisi ini juga ditopang oleh semakin berimbangya sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan laporan sebagaimana terlihat dari meningkatnya peran pembentukan modal tetap bruto dan ekspor secara agregat serta masih kuatnya konsumsi.

Grafik 1.2. Sumbangan Pertumbuhan (Dengan Migas) Menurut Penggunaan



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.3. Sumbangan Pertumbuhan (Tanpa Migas) Menurut Penggunaan



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (yoy)

PDRB	2010**				2011***			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Konsumsi	7,22	7,21	7,53	7,30	6,90	6,31	5,68	5,83
PMTB	8,91	8,98	8,27	7,58	7,74	8,79	8,85	8,12
PMTB Non Migas	18,91	15,02	12,22	11,24	8,28	10,38	8,85	10,22
Ekspor	2,93	3,10	3,79	5,18	-0,16	0,77	1,17	4,71
Migas	0,24	3,81	4,00	6,50	-4,11	-5,62	-5,59	3,69
Non Migas	7,66	2,01	3,46	3,29	6,28	10,88	12,02	6,20
Impor	14,57	6,84	5,35	8,84	2,94	5,48	3,46	8,16
Migas	-4,49	28,87	11,69	54,90	10,21	-11,23	-14,48	-34,89
Non Migas	15,65	6,09	5,06	7,73	2,60	6,17	4,35	9,65
Total	2,90	3,77	4,76	5,22	4,04	3,44	3,93	4,63
Tanpa Migas	6,01	6,75	7,95	7,84	7,51	7,54	7,64	7,40

Sumber : BPS Provinsi Riau

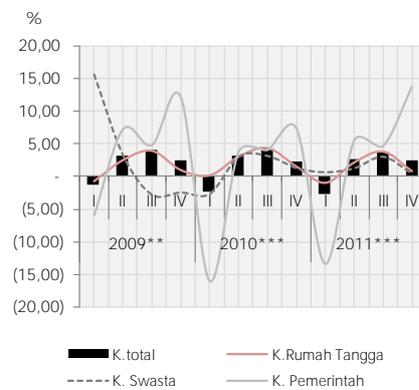
Ket : ***) Data Sangat Sementara, **) data sementara

2.1. Konsumsi

Konsumsi Riau pada triwulan laporan secara umum tumbuh meningkat dari 5,68% (yoy) pada triwulan III-2011 menjadi 5,83% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya belanja pemerintah daerah. Disamping itu, kondisi tersebut juga turut didukung oleh semakin menguatnya optimisme masyarakat terhadap perekonomian Riau yang berimplikasi pada meningkatnya konsumsi masyarakat.

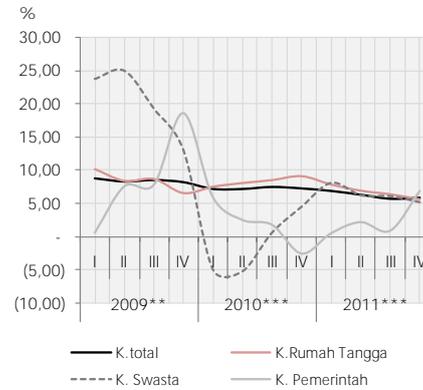
Penguatan optimisme masyarakat terlihat dari pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)¹ Riau pada triwulan laporan yang menunjukkan kenaikan dan berada pada titik tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini. (Grafik 1.6) yang ditunjang pula oleh trend melambatnya laju inflasi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat sebesar 6,95% (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III-2011 yang mencapai 0,94% (yoy).

Grafik 1.4. Pertumbuhan Komponen Konsumsi (qtq,%)



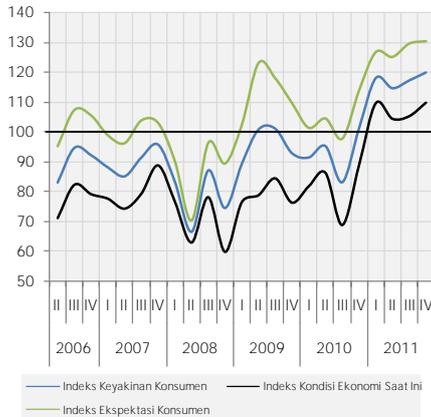
Keterangan : **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 1.5. Pertumbuhan Komponen Konsumsi (yoy,%)



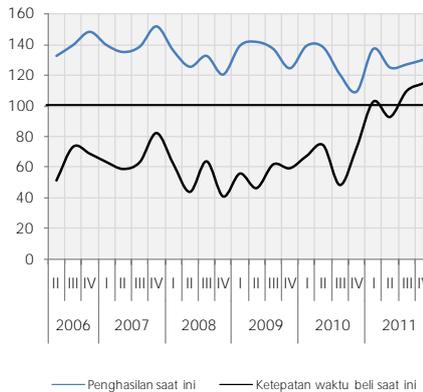
¹ Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru triwulan IV-2011

Grafik 1.6. Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen Riau



Sumber : Survei Konsumen BI

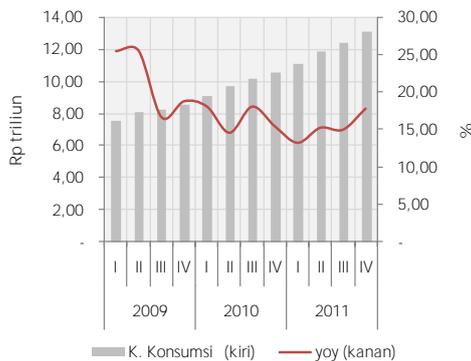
Grafik 1.7. Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



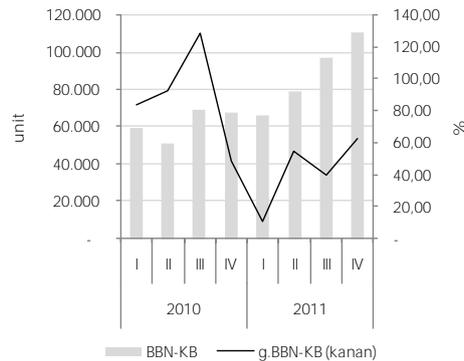
Sumber : Survei Konsumen BI

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi juga tercermin dari pertumbuhan riil² kredit konsumsi yang merupakan cerminan konsumsi yang dibiayai dari dana perbankan. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit riil konsumsi mengalami peningkatan yakni dari 15,20% (yoy) pada triwulan III-2011 menjadi 17,79% (yoy). Disamping itu, menguatnya konsumsi juga dicerminkan dari meningkatnya pertumbuhan pembelian kendaraan bermotor di Provinsi Riau yang pada akhir tahun tumbuh sebesar 63,60% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2011 dan periode yang sama tahun sebelumnya yakni masing-masing sebesar 40,20% (yoy) dan 48,72% (yoy).

Grafik 1.8. Perkembangan Kredit Konsumsi di Riau



Grafik 1.9. Pembelian Kendaraan Bermotor di Riau (BBN-KB)



Sumber : Dispenda Provinsi Riau

² Pertumbuhan kredit riil dibobot dengan menggunakan IHK Kota Pekanbaru

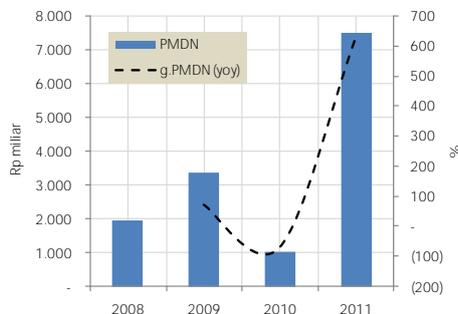
2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan PMTB Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat sebesar 8,12% (yoy) namun masih berada pada level yang relatif tinggi. Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, PMTB Riau tercatat tumbuh sebesar 10,22% (yoy) atau lebih tinggi bila dibandingkan periode sebelumnya.

Meningkatnya pertumbuhan PMTB non migas diindikasikan sejalan dengan masih berlangsungnya percepatan pembangunan infrastruktur PON ke-18 yang akan diselenggarakan di Provinsi Riau pada tahun 2012 mendatang. Sampai dengan triwulan IV-2011, beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung antara lain perluasan bandara SSK II, pembangunan *fly over*, gedung Bank Riau Kepri dan termasuk stadion utama PON yang berlokasi di Universitas Riau. Kondisi ini juga didukung oleh pertumbuhan masih tingginya pertumbuhan konsumsi semen di Riau yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 32,75% (yoy).

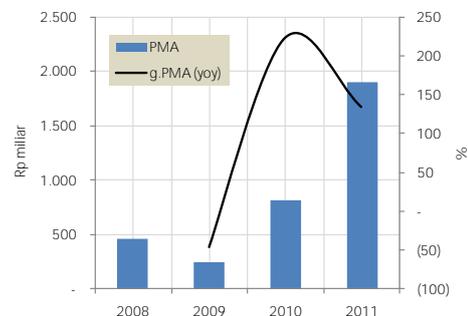
Beberapa indikator lain yang mendukung tingginya pertumbuhan PMTB adalah laju pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2011, diketahui bahwa total investasi yang diserap dalam bentuk PMDN mencapai Rp7,5 triliun, atau naik sekitar 623% dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp1,04 triliun dan berada pada urutan ke-4 di tingkat nasional, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011, Provinsi Riau merupakan daerah tujuan investasi yang menarik bagi para investor lokal.

Grafik 1.10 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Riau



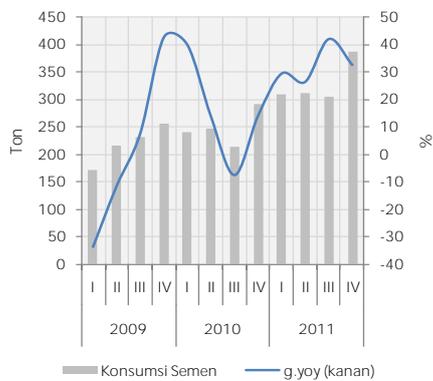
Sumber : BKPM

Grafik 1.11 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Riau



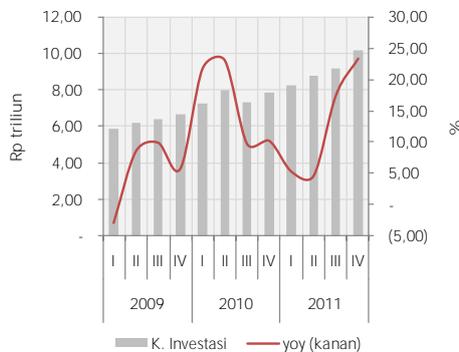
Sumber : BKPM

Grafik 1.12. Penjualan Semen di Riau



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

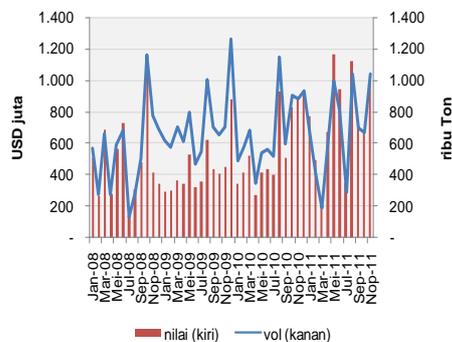
Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Investasi di Riau



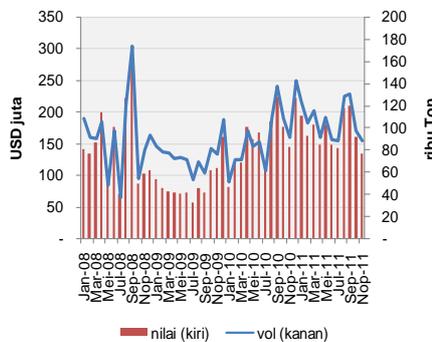
2.3. Ekspor Impor

Total ekspor Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat perkembangan yang cukup menggembarakan dimana tumbuh meningkat sebesar 4,71% (yoy) atau mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,17% (yoy). Di sisi lain, impor mengalami juga tercatat tumbuh meningkat yakni dari 3,46% (yoy) pada triwulan III-2011 menjadi 8,16% pada triwulan IV-2011. Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, kinerja perdagangan eksternal Riau relatif melambat bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor non migas tercatat sebesar 6,02% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan III-2011 yang mencapai 12,02% (yoy) namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,29% (yoy).

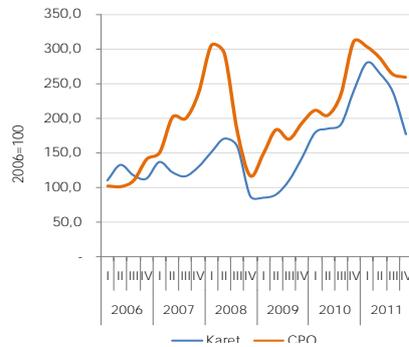
Grafik 1.14. Nilai dan Volume Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Provinsi Riau



Grafik 1.15. Nilai dan Volume Ekspor Pulp and Paper Provinsi Riau

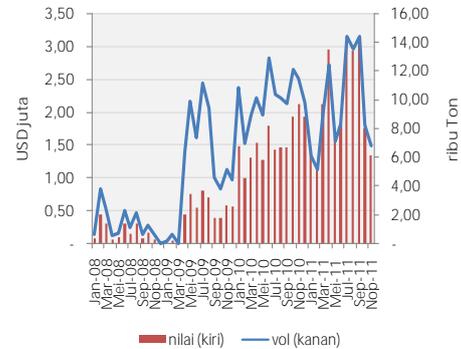


Grafik 1.16. Pergerakan Harga CPO dan Karet Dunia (2006=100)



Sumber : Bloomberg

Grafik 1.17. Nilai dan Volume Ekspor Karet Olahan Provinsi Riau



Di sisi lain, pertumbuhan impor non migas Riau pada triwulan laporan mengalami kenaikan cukup signifikan yakni dari 4,35% (yoy) menjadi 9,65% (yoy). Komposisi impor non migas Riau sebagian besar didominasi oleh bahan kimia (pupuk non organik), kertas karton dan mesin.

3. PDRB SEKTORAL

Kinerja ekonomi sektoral Riau pada triwulan laporan secara umum menunjukkan hal yang menggembirakan dimana seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Pada sektor *tradables*, motor penggerak perekonomian Riau utamanya berasal dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sementara, pada sektor *non tradables*, sektor perdagangan masih tetap menjadi roda penggerak utama perekonomian sejalan dengan meningkatnya berbagai aktivitas kegiatan dunia selama triwulan laporan.

Pertumbuhan tertinggi secara sektoral terjadi pada sektor bangunan yaitu sebesar 14,04% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2011 dan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,77% (yoy). Relatif tingginya pertumbuhan pada sektor bangunan diindikasikan sejalan dengan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur PON 2012 yang dijadwalkan akan selesai pada pertengahan tahun 2012.

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral (yoy)

PDRB	2010**				2011***			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	2,98	3,08	4,82	4,86	4,55	3,94	3,58	2,41
Pertambangan	0,19	1,12	1,74	2,66	0,89	-0,37	0,27	1,97
- Migas	0,02	0,97	1,56	2,54	0,65	-0,65	-0,01	1,75
- Non Migas	9,60	9,64	11,06	8,66	12,89	13,94	13,65	12,62
Industri Pengolahan	4,99	5,93	7,76	7,92	7,42	7,42	7,66	5,19
- Migas	1,46	2,23	4,74	4,98	2,28	1,79	3,81	2,60
- Non Migas	6,07	7,07	8,64	8,73	8,91	9,09	8,74	5,88
Listrik, Gas dan Air	3,82	5,08	8,90	4,62	5,46	7,56	9,21	6,73
Bangunan	9,14	9,47	9,07	7,77	9,99	12,38	13,25	14,04
Perdagangan	8,05	9,77	10,50	12,22	9,10	9,13	9,61	12,38
Pengangkutan	7,98	9,40	11,31	8,97	8,91	9,02	9,59	11,12
Keuangan	8,94	10,32	10,16	9,03	9,58	9,37	9,46	10,22
Jasa-jasa	8,07	8,85	8,98	7,89	8,04	8,07	8,82	8,92
Total	2,90	3,77	4,76	5,22	4,04	3,44	3,93	4,63
Tanpa Migas	6,01	6,75	7,95	7,84	7,51	7,54	7,64	7,40

Keterangan : **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

3.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian Riau pada triwulan IV-2011 tercatat tumbuh melambat sebesar 2,41%, sejalan dengan tidak optimalnya produksi tanaman perkebunan kelapa sawit meskipun berada pada siklus panen. Hal ini utamanya disebabkan oleh relatif tingginya curah hujan bulan November hingga Desember sehingga mengakibatkan banjir di beberapa daerah seperti Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu yang merupakan sentra produksi tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau.³

Tabel 1.5. Angka Ramalan Tanaman Padi di Riau

Keterangan	Periode			Perkembangan			
	2009	2010	2011 ARAM III	2009-2010		2010-2011	
				Absolut	%	Absolut	%
a Luas Panen							
- Januari - April	69,943	74911	77,561	4,968	7.10	2,650	3.54
- Mei - Agustus	52,560	45884	38,078	(6,676)	(12.70)	(7,806)	(17.01)
- September - Desember	26,920	35293	25,540	8,373	31.10	(9,753)	(27.63)
- Januari - Desember	149,423	156,088	141,179	6,665	4.46	(14,909)	(9.55)
b Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	32.79	36.21	34.71	3.42	10.43	(1.50)	(4.14)
- Mei - Agustus	39.37	37.94	39.75	(1.43)	(3.63)	1.81	4.77
- September - Desember	35.35	36.69	36.86	1.34	3.79	0.17	0.46
- Januari - Desember	35.57	36.83	36.46	1.26	3.56	(0.37)	(1.00)
c Produksi (ton)							
- Januari - April	229,344	271,276	269,231	41,932	18.28	(2,045)	(0.75)
- Mei - Agustus	206,910	174,095	151,369	(32,815)	(15.86)	(22,726)	(13.05)
- September - Desember	95,175	129,493	94,145	34,318	36.06	(35,348)	(27.30)
- Januari - Desember	531,429	574,864	514,745	3,809	8.17	(60,119)	(10.46)

Keterangan : Bentuk Produksi Padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

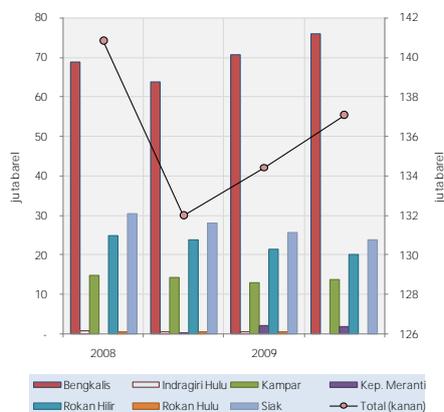
³ Berdasarkan hasil liason, diketahui bahwa periode panen puncak terjadi pada bulan Agustus hingga November.

Sementara itu, pada sektor tanaman pangan, berdasarkan data ARAM III 2011, diketahui bahwa produksi tanaman padi di Riau diperkirakan relatif turun sebesar 27,30%. Penurunan ini diperkirakan dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen padi yang tersedia pada tahun 2011. Namun, mengingat relatif kecilnya peranan sub sektor ini sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap perlambatan pertumbuhan pada sektor pertanian.

3.2. Pertambangan dan Pengalihan

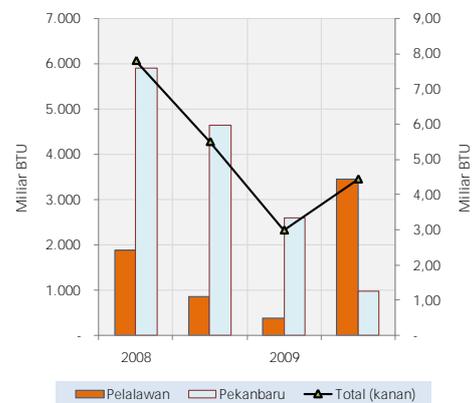
Sektor pertambangan Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh positif sebesar 1,97%, meningkat cukup berarti dibandingkan dengan triwulan III-2011 yang tercatat tumbuh sebesar 0,27% (yoy). Kondisi ini diperkirakan sejalan dengan telah pulihnya produksi *lifting* minyak milik PT Chevron Pasific Indonesia di wilayah Duri yang merupakan penyumbang *lifting* terbesar bagi produksi minyak Indonesia.

Grafik 1.18. Nilai Lifting Minyak Bumi Menurut Kab./Kota di Provinsi Riau (juta barel)



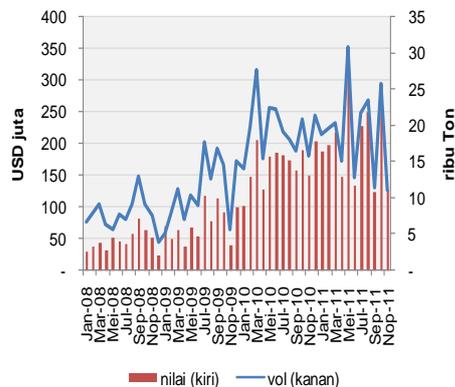
Sumber : Dirjen Migas ESDM

Grafik 1.19. Nilai Lifting Gas Bumi Menurut Kab./Kota di Provinsi Riau (Miliar BTU)

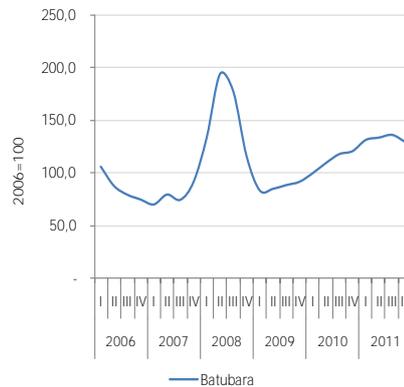


Sumber : Dirjen Migas ESDM

Grafik 1.20. Nilai dan Volume Ekspor Batubara Provinsi Riau



Grafik 1.21. Pergerakan Harga Batubara Dunia (2006=100)



Sumber : Bloomberg

Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, laju pertumbuhan sektor pertambangan mencatat angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 12,62%. Kondisi ini juga cukup mendorong tumbuhnya sektor pertambangan pada triwulan laporan. Relatif tingginya pertumbuhan yang terjadi pada sektor pertambangan non migas diperkirakan tidak terlepas akibat masih tingginya permintaan batubara dari Cina yang digunakan sebagai bahan baku energi oleh industri di negara tersebut.

3.3. Industri Pengolahan

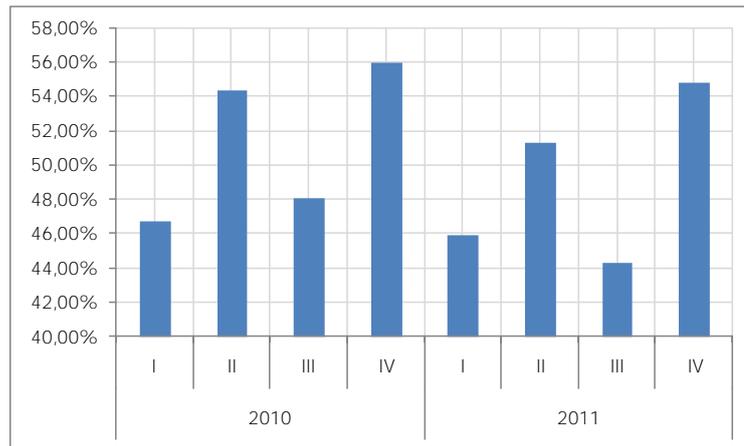
Sektor industri pengolahan Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat yakni dari 7,66% (yoy) pada triwulan III-2011 menjadi 5,19% (yoy). Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan baik dibandingkan dengan triwulan III-2011 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat faktor rambatan krisis keuangan global yang mengakibatkan pelemahan perdagangan dunia khususnya baik pada negara industri maju maupun berkembang.

3.4. Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Sektor PHR pada triwulan laporan tumbuh meningkat menjadi 12,38% (yoy), meningkat baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2011 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya sektor PHR tidak terlepas dari masih kuatnya konsumsi serta stabilnya kinerja perdagangan eksternal Riau. Di sisi lain, meningkatnya kondisi ini juga dicerminkan dari meningkatnya tingkat hunian hotel (hotel berbintang 3,4,5) di Kota pekanbaru yakni dari 44,35% pada

triwulan III-2011 menjadi 54,89% pada triwulan laporan. Sementara, tingkat hunian hotel relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya sejalan dengan adanya faktor hari raya yang mempengaruhi permintaan kamar di Kota Pekanbaru.⁴

Grafik 1.22. Tingkat Hunian Hotel Berbintang 3,4,5 di Kota Pekanbaru



Sumber : Asosiasi Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia

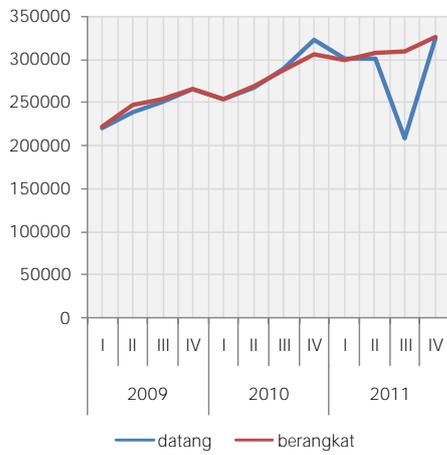
3.5. Pengangkutan dan Komunikasi

Secara umum perkembangan sektor pengangkutan dalam triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi di Riau mencapai 11,12% (yoy), meningkat baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,59% (yoy) maupun pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 8,97% (yoy).

Salah satu indikator yang mendukung kondisi tersebut adalah relatif tingginya arus kedatangan dan keberangkatan penumpang dan pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II dalam triwulan III-2011. Secara umum, hal ini diperkirakan terkait dengan adanya periode akhir tahun menjelang perayaan tahun baru dan hari raya natal sehingga turut mendorong permintaan terhadap moda transportasi udara.

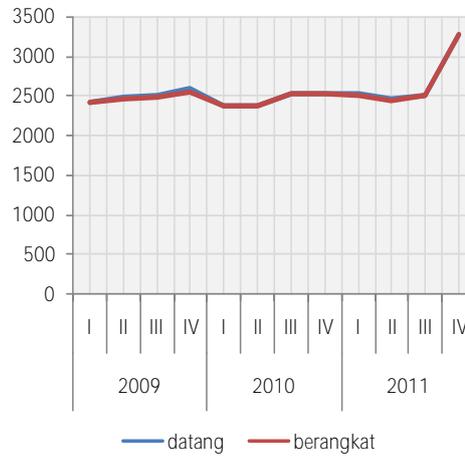
⁴ Berdasarkan informasi dari asosiasi perhimpunan hotel dan restoran Riau, diketahui bahwa permintaan kamar hotel sangat dipengaruhi oleh dinamika aktivitas bisnis di Riau. Sementara, hari raya idul fitri yang jatuh pada triwulan laporan, umumnya membuat kegiatan aktivitas bisnis di hotel cenderung menurun.

Grafik 1.23. Arus Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara SSK II



Sumber : PT. Angkasa Pura II

Grafik 1.24. Arus Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat di Bandara SSK II



Pemetaan Komoditas Unggulan dan Potensial Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki pilar-pilar kebijakan strategis yang meliputi : (1) Pengaturan kepada Perbankan yang mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM, (2) Pengembangan kelembagaan yang menunjang, (3) Pemberian bantuan teknis, (4) Kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan lembaga Pemerintah maupun lembaga lainnya. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui penyediaan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah, yang memberikan informasi mengenai Komoditas/Produk/Jenis usaha (KPJu) Unggulan yang dapat menjadi tumpuan prioritas pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing produk. Penelitian tersebut diatas, khusus untuk Provinsi Riau telah dilakukan sejak tahun 2007.

Pada tahun 2011 untuk Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah dilakukan Penelitian untuk mengidentifikasi KPJu Unggulan masing-masing Kabupaten. Dari hasil penelitian diperoleh informasi mengenai : (i) KPJu Unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di Prov. Riau, (ii) KPJu Potensial yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki

potensi untuk menjadi unggul di masa yang akan datang, (iii) KPJu Lintas Sektoral.

KPJu Unggulan adalah KPJu yang mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisinya saat ini dan prospeknya, serta mempunyai daya saing yang tinggi.

KPJu Potensial adalah KPJu yang saat ini belum menjadi unggulan, namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa yang akan datang apabila mendapat perlakuan atau kebijakan tertentu.

KPJu Lintas Sektoral adalah hasil pemilihan dari berbagai KPJu Unggulan per sektor di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi unggulan atau potensi daerah tersebut.

Penelitian mengambil 10 besar peringkat KPJu tertinggi dari masing-masing sektor/subsektor (Pertanian/Tanaman Pangan, Perindustrian, Perkebunan, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata/Hotel/Restoran, Transportasi, Jasa), selanjutnya 10 besar peringkat KPJu tertinggi tersebut dikonfirmasi kepada responden ahli pada sektor/subsektor masing-masing di tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu, sehingga terpilih 5 KPJu Unggulan seperti table berikut ini :

Kabupaten Rokan Hilir : 5 KPJu Unggulan dan 5 KPJu Potensial Lintas Sektoral

No.	KPJU	Sektor
	KPJu Unggulan	
1.	Kelapa Sawit	Perkebunan
2.	Karet	Perkebunan
3.	Padi	Pertanian/Tanaman Pangan
4.	Ikan laut (tangkapan)	Perikanan
5.	Pabrik Kelapa Sawit	Perindustrian
	KPJu Potensial	
1.	Hotel (Melati)	Pariwisata/Hotel/Restoran
2.	Cabe Merah	Pertanian/Tanaman Pangan
3.	Kelapa Biasa / local	Perkebunan
4.	Perdagangan kelapa sawit	Perdagangan
5.	Lele (ikan kolam)	Perikanan

Jumlah responden : 317 KPJu

Kabupaten Indragiri Hulu: 5 KPJu Unggulan dan 5 KPJu Potensial Lintas
Sektoral

No.	KPJU	Sektor
	KPJu Unggulan	
1.	Kelapa Sawit	Perkebunan
2.	Karet	Perkebunan
3.	Kakao	Perkebunan
4.	Batubara	Pertambangan
5.	Pabrik Kelapa Sawit	Perindustrian
	KPJu Potensial	
1.	Perbankan	Jasa
2.	SPBU	Perdagangan
3.	Perabot Kayu	Perindustrian
4.	Pasir	Pertambangan
5.	Pengrajin Rotan	Perindustrian

Jumlah responden : 366 KPJu

Bab 2

PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

1. Kondisi Umum

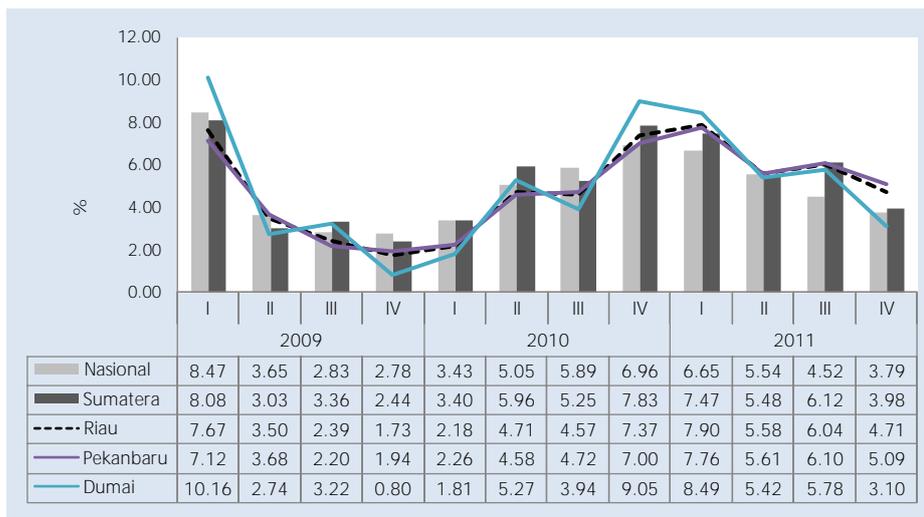
Dinamika perkembangan harga di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Tingkat inflasi, tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pekanbaru dan Dumai, menunjukkan kecenderungan yang menurun dan memiliki pergerakan yang searah (konvergen) dengan tingkat inflasi nasional. Kondisi ini bersumber dari terjaganya pasokan bahan pangan strategis sehingga turut mendorong relatif stabilnya inflasi bahan pangan bergejolak (*volatile foods*), disamping faktor

lainnya, yaitu *trend* penurunan harga komoditas pangan internasional dan apresiasi nilai tukar sampai dengan triwulan III-2011.

2. Perkembangan Inflasi Tahunan

Tekanan inflasi Riau pada akhir tahun 2011 mencapai 4,71% (yoy), menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya serta berada pada titik terendahnya selama tahun 2011. Meskipun mencatat angka yang rendah, namun inflasi Riau masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 3,79% (yoy) dan 3,98% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Provinsi Riau yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan bahan pangan dari wilayah sekitar.¹

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional, Sumatera dan Riau



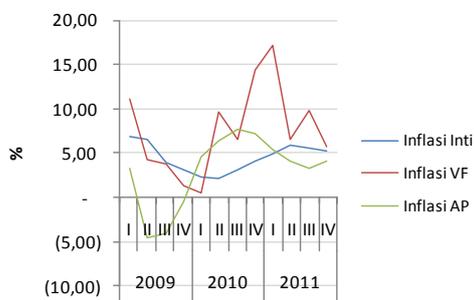
Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Ditinjau dari kota-kota yang menjadi basis perhitungan inflasi di Riau, inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan laporan mencatat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Kota Dumai. Relatif lebih rendahnya tingkat inflasi yang terjadi di Kota Dumai diperkirakan dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumsi beras yang cenderung substitusi dan juga dipengaruhi oleh adanya faktor *baseline effect*.

¹ Sekitar 70% kebutuhan pangan strategis Riau seperti beras, cabe merah, bawang merah, telur ayam ras, daging sapi dan sayur-sayuran dipasok dari wilayah hinterland (Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan).

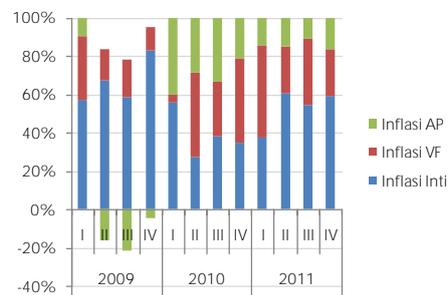
Berdasarkan hasil disagregasi inflasi², terlihat bahwa tekanan inflasi non inti³ di kedua kota, khususnya inflasi *volatile foods* (VF) menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan awal tahun 2011. Tingkat inflasi VF di kota Pekanbaru dan Dumai pada triwulan laporan masing-masing mencapai 5,68% (yoy) dan 0,41% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan awal tahun 2011 yang berada pada kisaran 17,00% (yoy) di kedua kota tersebut.

Grafik 2.2. Disagregasi Inflasi Pekanbaru



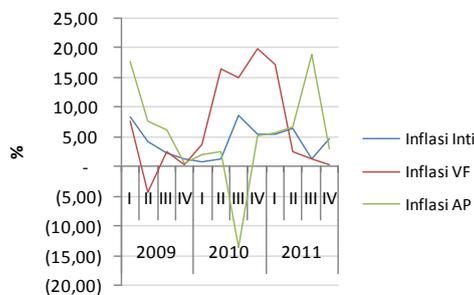
Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 2.3. Andil Inflasi Pekanbaru



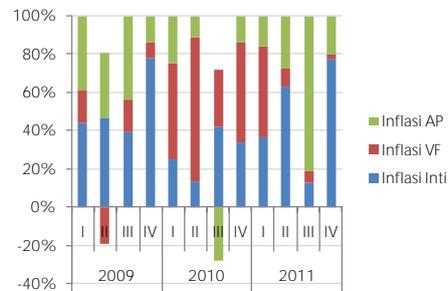
Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi Dumai



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 2.4. Andil Inflasi Dumai



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Secara umum, kondisi ini bersumber dari menurunnya inflasi bahan makanan khususnya kelompok padi dan bumbu-bumbuan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, inflasi kelompok bahan makanan di Kota Dumai mencatat penurunan tajam selama tahun 2011 dibandingkan dengan kelompok lainnya baik.

²Penghitungan inflasi inti dan non inti dilakukan berdasarkan pendekatan sub kelompok dengan mengacu kepada Nilai Konsumsi SBH 2007=100

³Inflasi non inti terdiri dari inflasi *Volatile Foods* dan *Administered Price*.

Fenomena ini diperkirakan dipengaruhi oleh preferensi konsumsi kualitas beras dan perilaku substitusi yang dilakukan oleh konsumen beras di Dumai. Berdasarkan hasil survei⁴, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jenis beras yang dikonsumsi di Kota Dumai dan Pekanbaru.

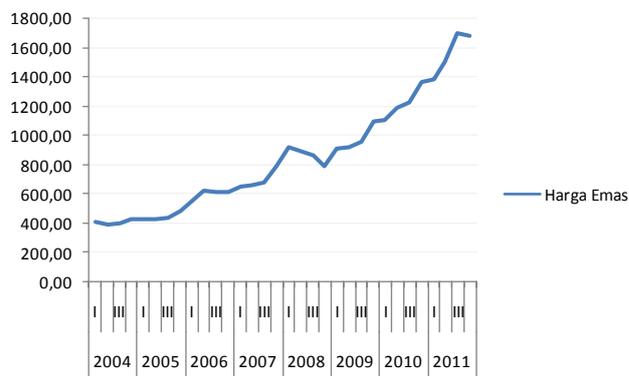
Tabel 2.1. Inflasi Tahunan Kota Pekanbaru dan Dumai Menurut Kelompok (yoy)

Kelompok	IV-10		I-11		II-11		III-11		IV-11	
	P	D	P	D	P	D	P	D	P	D
Bahan Makanan	13,55	19,12	16,70	16,65	7,07	3,22	9,77	6,00	6,01	0,69
Makanan Jadi	5,28	9,37	4,95	9,95	5,99	10,10	6,50	8,26	5,88	5,06
Perumahan	6,01	7,09	5,66	6,53	4,24	8,11	2,99	6,23	3,48	3,78
Sandang	6,83	5,83	8,09	6,77	7,57	7,88	9,63	12,21	6,33	10,68
Kesehatan	1,90	1,24	2,46	1,64	8,78	2,41	7,51	2,98	7,10	3,49
Pendidikan	6,98	3,26	7,20	3,17	6,69	2,44	6,63	3,78	7,18	5,92
Transportasi	1,87	-0,23	2,07	-0,03	2,48	1,05	1,78	0,47	2,73	0,34
Umum	7,00	9,05	7,76	8,49	5,61	5,42	6,10	5,78	5,09	3,10

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah,

Kelompok IHK lain yang juga tercatat mengalami inflasi tahunan cukup tinggi adalah pendidikan dan kesehatan baik di Kota Pekanbaru maupun Dumai. Relatif tingginya inflasi kelompok pendidikan diperkirakan tidak terlepas dari meningkatnya biaya pendidikan. Sementara, relatif tingginya inflasi yang terjadi pada kelompok sandang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas. Hal ini terjadi seiring dengan faktor krisis keuangan global sehingga mengakibatkan permintaan emas relatif tinggi (*safe haven asset*). Harga emas dunia pada triwulan laporan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi tertinggi yakni sebesar US\$1.683,21 atau naik 22,89% (yoy).

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Rerata Emas di Pasar Dunia (US\$/Oz)



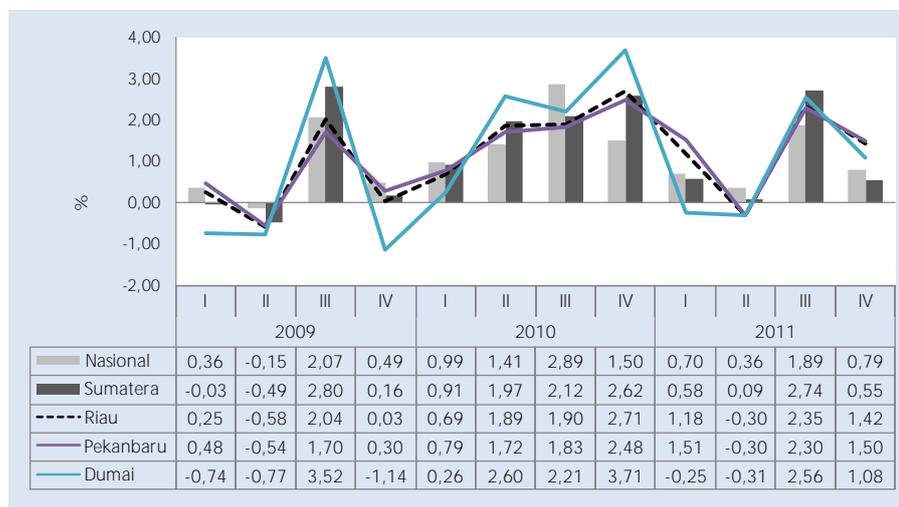
Sumber : Bloomberg

⁴Pedagang beras grosir di Kota Dumai

3. Perkembangan Inflasi Triwulanan

Perkembangan inflasi triwulanan kota-kota di Provinsi Riau pada triwulan laporan secara umum berada diatas tingkat inflasi Nasional dan Sumatera. Inflasi triwulanan Kota Pekanbaru dan Dumai pada triwulan laporan masing-masing mencapai 1,50% (qtq) dan 1,08% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya dan juga periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi (qtq) pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh relatif terjaganya pasokan bahan pangan di kedua kota tersebut.

Grafik 2.7. Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Pekanbaru, Dumai dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Inflasi triwulanan menurut kelompok di Kota Pekanbaru dan Dumai selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa inflasi terjadi hampir di seluruh kelompok IHK baik di Kota Pekanbaru maupun Dumai. Inflasi tertinggi di Kota Pekanbaru dan Dumai terjadi pada kelompok bahan makanan, sedangkan inflasi terendah terjadi pada sub kelompok kesehatan (Kota Pekanbaru) dan sub kelompok perumahan (Kota Dumai). Sementara, deflasi hanya terjadi pada pada kelompok transportasi di Kota Dumai yakni sebesar 0,11% (qtq).

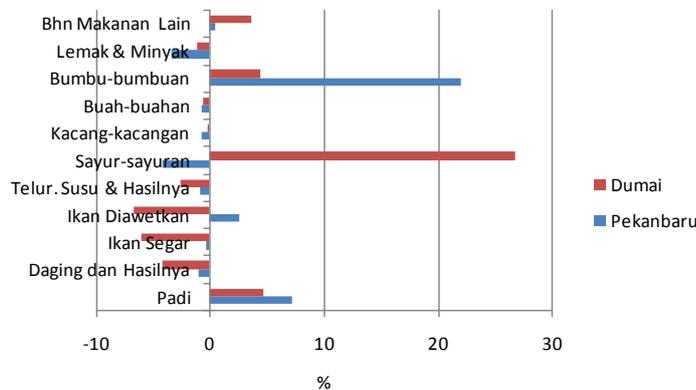
Tabel 2.2. Inflasi (qtq) Menurut Kelompok Barang & Jasa di Kota Pekanbaru dan Dumai 2010-2011

Kelompok	IV-10		I-11		II-11		III-11		IV-11	
	P	D	P	D	P	D	P	D	P	D
Bahan Makanan	6,49	7,70	3,11	-2,23	-4,06	-3,40	4,20	4,21	2,84	2,30
Makanan Jadi	2,38	3,67	1,43	1,20	1,25	0,23	1,30	2,95	1,78	0,61
Perumahan	0,49	2,91	1,19	0,22	0,29	2,19	0,99	0,78	0,98	0,55
Sandang	3,54	2,85	0,29	0,95	1,76	2,31	3,75	5,65	0,42	1,45
Kesehatan	0,51	0,06	0,53	1,07	6,10	0,89	0,28	0,93	0,13	0,56
Pendidikan	0,02	-0,09	0,28	0,42	0,07	0,04	6,24	3,39	0,54	1,98
Transportasi	-0,06	0,02	0,69	0,05	0,43	0,15	0,71	0,25	0,88	-0,11
Umum	2,48	3,71	1,51	-0,25	-0,30	-0,31	2,30	2,56	1,50	1,08

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Pada Kota Pekanbaru, relatif tingginya tingkat inflasi pada kelompok bahan makanan utamanya bersumber dari meningkatnya inflasi sub kelompok padi dan bumbu-bumbuan yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 7,17% (qtq) dan 22,02% (qtq). Sementara itu, di Kota Dumai, terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan utamanya didorong oleh peningkatan inflasi pada sub kelompok sayur-sayuran dan padi yakni masing-masing sebesar 26,81% (qtq) dan 4,66% (qtq).

Grafik 2.8. Inflasi (qtq) Menurut Sub Kelompok Bahan Makanan di Kota Pekanbaru dan Dumai Triwulan IV 2011



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Beberapa komoditas yang secara spesifik memberikan sumbangan cukup tinggi terhadap perubahan harga (inflasi/deflasi) di Kota Pekanbaru dalam triwulan laporan dirangkum pada Tabel 2.3. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa komoditas cabe merah dan beras memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi triwulan IV-2011 sebagaimana terlihat dari meningkatnya andil kedua komoditas tersebut sejak bulan Oktober hingga Desember 2011. Kondisi

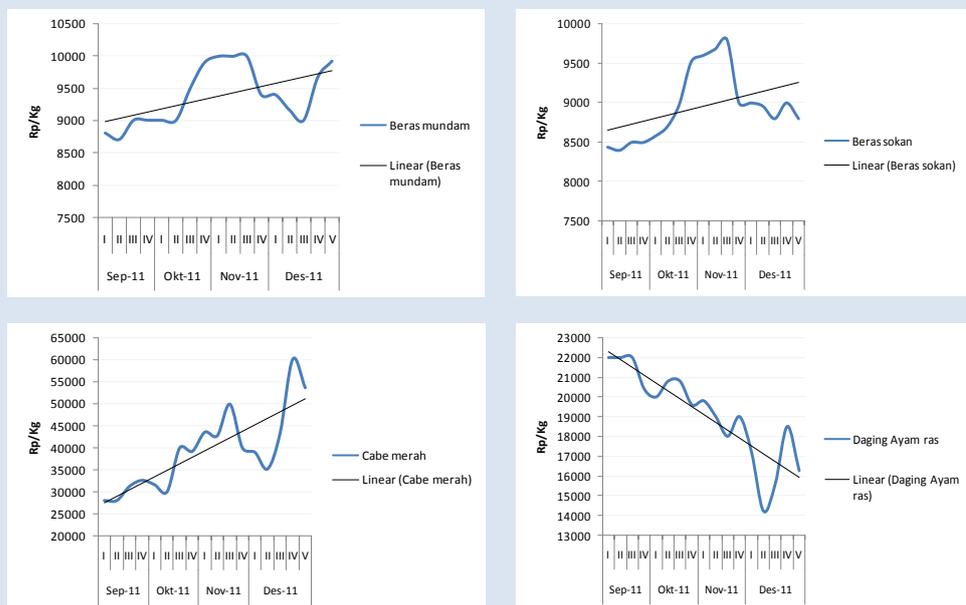
ini diindikasikan tidak terlepas akibat banjir yang terjadi pada sentra produksi utama di daerah tersebut sehingga menyebabkan produksi relatif terganggu. Hal ini juga dimanfaatkan oleh sebagian spekulan untuk meningkatkan harga jual di pasaran pada triwulan laporan. Harga cabe merah dan beras di Kota Pekanbaru dalam triwulan laporan mengalami kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 10,28% (qtq) dan 64,88% (qtq).

Tabel 2.3. Lima (5) Komoditas yang Memberikan Sumbangan Tertinggi Terhadap Inflasi di Kota Pekanbaru Dalam Triwulan IV 2011

No.	Perubahan Harga	Oktober		November		Desember	
		Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)
1	INFLASI	Beras	0,28	Cabe merah	0,18	Cabe merah	0,23
2		Daging ayam ras	0,22	Rokok	0,11	Ikan serai	0,14
3		Service kendaraan	0,10	Emas perhiasan	0,08	Beras	0,11
4		Cabe merah	0,09	Kontrak rumah	0,05	Bayam	0,05
5		Donat	0,05	Rokok kretek	0,05	Batu bata	0,04
1	DEFLASI	Ikan serai	0,04	Daging ayam ras	0,04	Kentang	0,03
2		Minyak goreng	0,04	Ikan serai	0,04	Daging ayam ras	0,03
3		Ikan tongkol	0,03	Telur ayam ras	0,03	Emas perhiasan	0,03
4		Bawang merah	0,03	Kelaapa	0,03	Bawang merah	0,02
5		Emas perhiasan	0,03	Bayam	0,03	Wortel	0,02

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 2.9 Perkembangan Harga Komoditas Strategis (Beras, Cabe Merah dan Daging Ayam Ras) di Kota Pekanbaru



Sumber : Disperindag Provinsi Riau

Studi Pemetaan Struktur Pasar Komoditas Strategis Inflasi di Provinsi Riau

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengendalian inflasi, informasi yang akurat mengenai karakteristik inflasi di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat diperlukan. Terlebih, dari studi yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri, diketahui bahwa inflasi yang persisten bersumber dari adanya permasalahan struktural di tingkat penawaran. Studi yang dilakukan Vaona dan Ascari (2010) terhadap 70 provinsi di Italia, berhasil menemukan bahwa perbedaan tingkat persistensi inflasi regional sangat terkait dengan perbedaan tingkat persaingan (struktur pasar) sektor retail di masing-masing provinsi. Salah satu pengetahuan dan informasi yang mesti dipahami adalah perilaku komoditas penyumbang inflasi

Upaya memahami inflasi dari sisi penawaran menjadi relevan karena harga di tingkat konsumen sangat terkait dengan harga yang ditentukan oleh produsen dan pedagang. Pembentukan harga oleh produsen dan pedagang dipengaruhi oleh perilaku perusahaan yang sangat berhubungan dengan struktur pasarnya. Disamping itu, harga di tingkat konsumen juga dipengaruhi oleh pola distribusi suatu barang. Gangguan terhadap pola distribusi akan berdampak besar terhadap ketersediaan (kelangkaan) barang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat harga.

Kondisi di atas melatarbelakangi pentingnya penelusuran secara lebih mendalam tentang masalah struktur pasar dan pola distribusi khususnya di Kota Pekanbaru dan Dumai, sebagai kota yang menjadi basis perhitungan inflasi di Provinsi Riau, terlebih dengan karakteristiknya yang merupakan daerah defisit pangan. Tentunya dari penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur pasar dan pola distribusi pada komoditas strategis penyumbang inflasi di Riau

dan turut serta membantu perumusan kebijakan dalam upaya menjaga kestabilan harga di daerah.

Dalam penelitian ini, wilayah yang menjadi obyek analisis terbatas pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Sementara, daerah sekitar (hinterland) yang menjadi daerah pemasok bahan pangan tidak menjadi area penelitian¹. Mengingat relatif minimnya jumlah produsen komoditas strategis di Provinsi Riau, maka fokus pembahasan perilaku pelaku usaha akan lebih ditekankan pada pedagang besar dan pengecer.

Dari hasil survei, dilakukan identifikasi struktur pasar di tingkat pedagang. Elemen-elemen struktur pasar yang digunakan antara lain jumlah pesaing sejenis dalam suatu kota, fluktuasi margin keuntungan, kemampuan dalam mengontrol harga dan kemampuan dalam mengontrol pasokan. Dari hasil identifikasi tersebut, diketahui bahwa struktur pasar komoditas pisang dan minyak goreng pada level distributor diindikasikan bersifat oligopoli sebagaimana terlihat dari relatif sedikitnya jumlah pesaing sejenis, sementara jumlah pedagang pengecer nya relatif banyak.

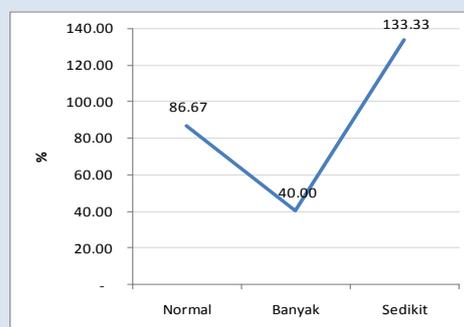
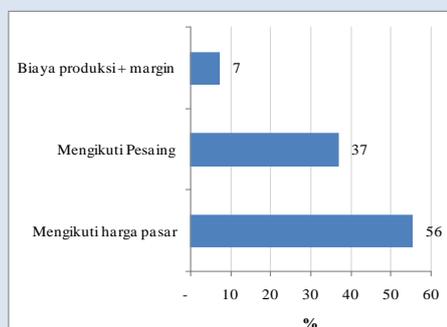
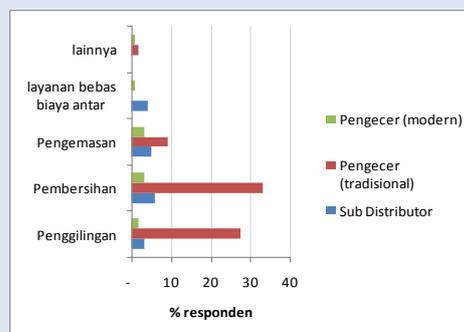
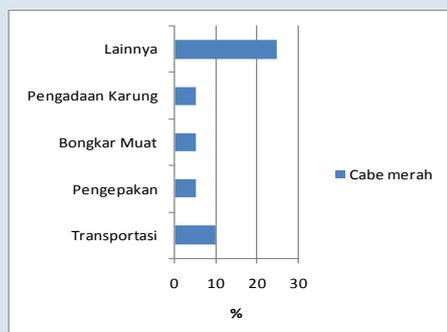
No	Komoditas	Tipe Pedagang	Jumlah Pesaing Sejenis di Kota	Fluktuasi margin	Kontrol Pasokan	Kontrol Harga	Indikasi Struktur Pasar
1	Beras	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
2	Cabe Merah	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
3	Pisang	D	< 50	Ya	tidak	Tidak	Oligopoli
		R	> 70	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
4	Bawang merah	D	> 50	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	>300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
5	Kelapa	D	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
6	Jeruk	D	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
7	Tomat sayur	D	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	>300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
8	Mie kering/basah	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
9	Minyak goreng	D	< 10	Ya	tidak	Tidak	Oligopoli
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
10	Gula pasir	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
11	Daging ayam ras	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 300	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
12	Daging sapi	D	> 50	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
13	Telur ayam ras	D	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 200	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
14	Ikan Tongkol	D	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
15	Ikan Serai	D	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna
		R	> 100	Ya	tidak	Tidak	Persaingan sempurna

Ket : D (Pedagang besar), R (Pengecer)

¹ Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* di beberapa pasar tradisional dan modern di Kota Pekanbaru dan Dumai pada bulan Oktober hingga November 2011. Jumlah sampel responden berjumlah 678 yang terdiri dari distributor dan pedagang pengecer.

Beberapa temuan empiris penting dari hasil penelitian antara lain (i) Dari 15 komoditas yang menjadi sampel penelitian, tipe persaingan oligopoli diindikasikan terjadi pada distributor pisang dan minyak goreng. (ii) Komoditas cabe merah merupakan komoditas yang mengalami fluktuasi margin tertinggi baik dalam kondisi pasokan normal, sedikit maupun banyak.

Mekanisme Pembantuan Harga Cabe Merah di Kota Pekanbaru dan Dumai



Harga jual cabe merah di tingkat pedagang cenderung memiliki fluktuasi yang cukup signifikan. Pada kondisi normal, pedagang cabe merah di Provinsi Riau dapat mencapai menjual dengan harga Rp28.000/kg. Sementara, harga beli dari petani atau pengepul besar hanya sekitar Rp15.000/Kg. Dengan demikian, margin keuntungan yang diperoleh pedagang dalam kondisi normal adalah sebesar 86,67%. Kemudian, pada saat pasokan sedang sedikit, margin keuntungan yang diterima pedagang dapat melonjak di atas 100%. Besarnya deviasi margin keuntungan di tingkat pedagang ini disebabkan oleh faktor karakteristik komoditas yang bersifat mudah busuk (*perishable*) sehingga pedagang cenderung memilih untuk tidak mengambil risiko dengan cara menurunkan margin keuntungannya. Harga cabe merah cepat berubah dimana harga di sore hari bisa turun jauh dari pada harga di pagi hari.

Berbeda halnya dari komoditas beras, dalam meningkatkan nilai tambah produknya, sebagian besar pedagang baik di tingkat sub distributor maupun pengecer cenderung

untuk melakukan pembersihan dan penggilingan sebelum produknya di jual ke konsumen. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pedagang, diketahui bahwa hal ini terkait dengan preferensi konsumen di Riau yang cenderung lebih menyukai cabe merah yang telah dihaluskan.

Dalam menentukan harga jualnya, mayoritas pedagang (56%) memilih mengikuti harga dari pesaing dalam menentukan harga jualnya. Sementara sekitar 37% responden memutuskan untuk mengikuti harga pesaing, dan hanya sebagian kecil responden (7%) yang menjual berdasarkan jumlah biaya produksi ditambah dengan margin.

Kesenjangan Output (*Output Gap*) dan Dampaknya Terhadap Inflasi di Provinsi Riau

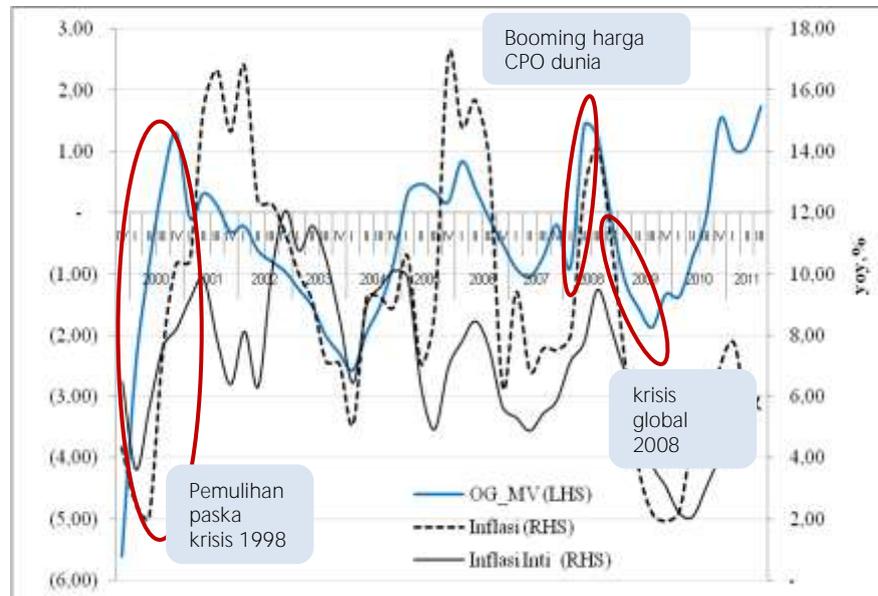
Pemahaman tentang output potensial dan *output gap* adalah vital dalam diskusi dan formulasi kebijakan ekonomi makro. *Output gap* didefinisikan sebagai persentase deviasi output aktual dari potensialnya. Dalam aplikasi ekonomi makro, output potensial menggambarkan lintasan output perekonomian yang dapat dianggap permanen dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam jangka menengah - panjang. Sedangkan *output gap* merupakan indikator ringkas dari tekanan inflasi yang berasal dari tekanan permintaan agregat akibat adanya permintaan berlebih (*excess demand*) dibandingkan output potensialnya. Semakin besar *output gap* berarti semakin tinggi tekanan inflasi yang terjadi. Output gap tersebut juga dapat menggambarkan siklus ekonomi (*business cycle*) yang terjadi dalam suatu perekonomian.

Pentingnya estimasi output potensial dan *output gap* dalam kebijakan ekonomi makro merupakan suatu tantangan besar karena kedua variabel tersebut merupakan besaran-besaran yang tidak teramati atau laten (*unobservable*), sehingga pengukurannya banyak mengandung *uncertainty*. Satu metode dengan metode lainnya menghasilkan estimasi yg berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Metodologi estimasi potensial output dan *output gap* yang baik, disamping mampu melakukan estimasi *output gap*, juga harus didasarkan pada teori ekonomi yang solid dan mengikutsertakan variabel-variabel ekonomi, sehingga sanggup memfasilitasi interpretasi dari dinamika estimasi output potensial dan *output gap* yang dihasilkan (Tjahjono et al., 2010).

Selama ini, pengukuran *output gap* dan output potensial di Indonesia biasanya dilakukan dengan data agregat nasional. Studi ini bertujuan menghitung *output gap* serta menginvestigasi seberapa jauh peranan *output gap* dalam mempengaruhi inflasi di

Provinsi Riau. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin besar *output gap* akan mengakibatkan tingginya tekanan inflasi yang terjadi.¹

Grafik 1. Pergerakan Output Gap dan Inflasi di Provinsi Riau



Pada beberapa periode tertentu, dari grafik diatas terlihat bahwa pergerakan *output gap* pada masa pemulihan paska krisis moneter 1998 bergerak mendahului (*leading*) inflasi pada satu triwulan sebelumnya dengan *magnitude* yang relatif simetris. Kondisi ini diperkirakan sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan perekonomian sehingga pelaku usaha berupaya untuk memacu kapasitas perekonomian setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam paska terjadinya krisis tahun 1998.

Sementara itu, *output gap* Riau menunjukkan pergerakan beriringan (*coincidence*) khususnya pada triwulan II tahun 2008. Periode ini merupakan saat terjadinya terjadinya booming harga CPO dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Riau melonjak tajam. Namun, fenomena ini tidak berlangsung lama mengingat pada akhir tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang dipicu oleh kredit macet pada sektor properti di Amerika Serikat (*sub prime mortgage*). Hal tersebut berakibat menurunnya kapasitas produksi sektor industri pengolahan menurun seiring dengan melemahnya permintaan komoditas CPO dari negara mitra dagang khususnya Cina dan India. Sebagai konsekuensi dari

¹ Estimasi output gap dilakukan dengan tiga metode yakni Hodrick Prescott Filter (HP-Filter), Peak to Peak dan Multivariate Filter (MV). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa output gap dengan metode MV mampu memberikan pergerakan yang lebih konvergen dengan pergerakan inflasi di Provinsi Riau.

Memasuki triwulan IV-2011, berdasarkan hasil estimasi multivariate, diketahui bahwa tekanan *output gap* Provinsi Riau berada dalam *magnitude* yang positif. Hal ini diindikasikan terkait prakiraan meningkatnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sejalan dengan terbatasnya pasokan. Sebagaimana diketahui, sekitar 49% masyarakat Riau utamanya bekerja pada sektor pertanian terutama pada sub sektor perkebunan. Tentunya peningkatan harga TBS akan memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan belanja dan masyarakat secara agregat.

Bab 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN

DAERAH

1. Kondisi Umum

Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian, kegiatan usaha perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 secara umum juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terlihat pada sejumlah indikator seperti meningkatnya aset, penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jaringan kantor. Meskipun kredit tumbuh signifikan, namun kualitas kredit masih tetap terjaga yang terlihat pada rendahnya rasio kredit bermasalah/*non performing loan* (NPL). Sementara itu operasional perbankan cukup efisien sehingga mendorong peningkatan laba usaha dibandingkan triwulannya.

2. Perkembangan Perbankan Riau

Total aset perbankan Riau pada triwulan IV-2011 tercatat sebesar Rp60,67 triliun mengalami peningkatan sebesar 0,72% dibandingkan triwulan III-2011 yang sebesar Rp60,24 triliun (q-t-q) sehingga secara tahunan tumbuh sebesar 19,95%(y-o-y). Kenaikan aset tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 2,15% (q-t-q) dan 21,28% (y-o-y) yang mana pada triwulan laporan mencapai Rp45,56 triliun (tabel 3.1).

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau
(dalam Rp. Juta)

Indikator	2010	2011		Growth (%)		
		III	IV	q-t-q	y-o-y	y-t-d
Jumlah Bank	71	75	75	-	5.63	5.63
- Bank Umum	41	44	44	-	7.32	7.32
- BPR	30	31	31	-	3.33	3.33
- Jaringan Kantor	552	601	619	3.00	12.14	12.14
Aset	50,582,924	60,238,861	60,672,880	0.72	19.95	19.95
DPK	37,567,101	44,604,889	45,562,890	2.15	21.28	21.28
Kredit	29,710,195	34,224,188	36,700,480	7.24	23.53	23.53
LDR	79.09	76.73	80.55	4.98	1.85	1.85
NPL	2.42%	2.50%	2.05%			
Kredit Lokasi Proyek	42,380,364	50,011,229	51,090,943	2.16	20.55	20.55
LDR Kredit Lokasi Proyek	112.81%	112.12%	112.13%			

Dengan meningkatnya DPK, tentunya semakin mendorong kemampuan perbankan Riau untuk meningkatkan porsi penyaluran kreditnya. Total kredit pada triwulan IV-2011 tercatat sebesar Rp36,70 triliun, meningkat sebesar 7,24% dari triwulan sebelumnya (q-t-q), yang sebesar Rp34,24 triliun. Lebih

tingginya laju pertumbuhan kredit tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, telah mendorong peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau dari 76,73% menjadi 80,55% pada triwulan laporan. Sementara jika dilihat berdasarkan lokasi proyek, kredit perbankan Riau mencapai Rp51,09 triliun, sehingga LDR perbankan Riau tercatat lebih tinggi yakni sebesar 102,13%. Di sisi lain, meskipun kredit tumbuh cukup tinggi namun rasio kredit bermasalah (*NPL gross*) perbankan Riau pada triwulan laporan relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yakni dari 2,50% menjadi sebesar 2,05%.

3. Perkembangan Bank Umum

3.1. Perkembangan Jaringan Kantor

Tabel 3.2. Perkembangan Bank di Provinsi Riau
Triwulan IV-2011

Keterangan	2010	2011		Growth (%)		
		Tw-III	Tw-IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
1. Jumlah Bank	43	44	44	-	2,33	2,33
- Pemerintah	6	6	6	-	-	-
- Swasta	29	29	29	-	-	-
- Syariah	5	5	5	-	-	-
- Unit Usaha Syariah	3	4	4	-	33,33	33,33
2. Kantor Pusat	1	1	1	-	-	-
3. Kantor Cabang	80	82	83	1,22	3,75	3,75
- Pemerintah	42	43	43	-	2,38	2,38
- Swasta	38	39	40	2,56	5,26	5,26
4. Kantor Cabang Pembantu	332	370	384	3,78	15,66	15,66
5. Kantor Kas	51	55	56	1,82	9,80	9,80
6. Lainnya *)	88	93	95	2,15	7,95	7,95
Jumlah	552	601	619	3,00	12,14	12,14

Dalam upaya memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memperoleh akses layanan jasa perbankan dan meningkatkan skala usaha, serta sesuai dengan rencana bisnis bank,

perbankan Riau pada triwulan IV-2011 telah memperluas jaringan kantornya. Hal ini terlihat pada bertambahnya jumlah jaringan kantor bank dari 601 buah pada triwulan III-2011 menjadi 619 kantor bank. Penambahan terjadi pada jumlah kantor cabang milik pemerintah berupa kantor cabang pembantu dan kantor kas (tabel 3.2).

Sementara itu berdasarkan penyebarannya, sebagian besar lokasi jaringan kantor bank masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru, yang diikuti oleh Kabupaten Bengkalis. Banyaknya jumlah kantor bank di kedua daerah tersebut tidak terlepas dari besarnya aktivitas ekonomi di wilayah ini. Namun guna lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat kepada perbankan

diharapkan untuk dapat memperluas jaringan kantornya pada daerah-daerah yang belum tersentuh layanan perbankan (Tabel 3.3).

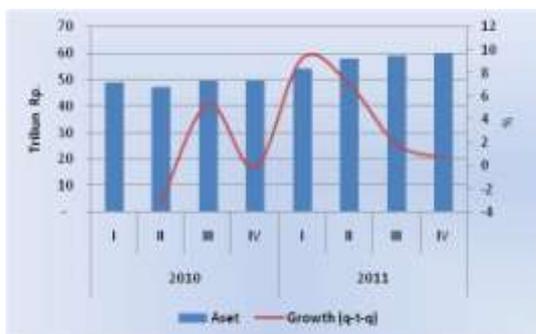
Tabel 3.3. Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau Triwulan IV-2011

Wilayah	KP	KC	KCP	KK	Lainnya	Jumlah
Kota Pekanbaru	1	48	114	26	41	230
Kota Dumai	-	8	20	2	10	40
Kab. Kampar	-	2	35	3	3	43
Kab. Siak	-	2	30	4	8	44
Kab. Bengkalis	-	5	40	4	10	59
Kab. Pelalawan	-	2	28	4	4	38
Kab. Rokan Hulu	-	1	21	2	2	26
Kab. Rokan Hilir	-	2	23	1	2	28
Kab. Indragiri Hulu	-	4	25	5	5	39
Kab. Indragiri Hilir	-	4	20	2	4	30
Kab. Kuantan Singingi	-	2	21	3	3	29
Kab. Kep. Meranti	-	3	7	1	2	13
Jumlah	1	83	384	57	94	619

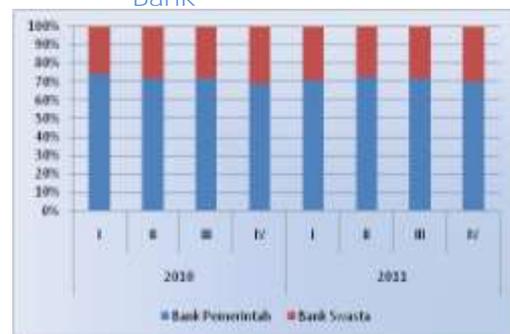
3.2. Perkembangan Aset

Aset bank umum di Riau pada triwulan IV-2011 tercatat sebesar Rp59,75 triliun atau meningkat sebesar 19,95% (y-o-y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompoknya, komposisi aset bank umum di Riau tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya dimana aset bank milik pemerintah masih memiliki pangsa terbesar sebagaimana terlihat pada triwulan laporan yang sebesar Rp41,73 triliun atau sekitar 69,84% terhadap total aset bank umum di Riau (grafik 3.1. dan grafik 3.2)

Grafik 3.1.
Perkembangan Aset Bank Umum



Grafik 3.2.
Pangsa Aset Menurut Kelompok Bank



3.3. Kredit

3.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Sementara itu, kredit yang disalurkan oleh bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp36,08 triliun, atau tumbuh sebesar 23,59% (yoy). Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok bank swasta yakni sebesar 29,11% sementara pada kelompok bank pemerintah tercatat sebesar 20,76%. Namun demikian berdasarkan pangsa, kelompok bank pemerintah masih mendominasi dengan pangsa sebesar 64,56% sementara bank swasta sebesar hanya 35,44%. (tabel 3.4).

Tabel 3.4. Posisi Kredit Bank Umum Di Provinsi Riau
(dalam Rp juta)

Keterangan	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
A. Kelompok Bank	29,194,961	33,623,173	36,082,932	7.32	23.59	23.59
- Bank Pemerintah	19,290,340	21,700,994	23,295,168	7.35	20.76	20.76
- Bank Swasta Nas.	9,904,621	11,922,179	12,787,764	7.26	29.11	29.11
B. Valuta	29,194,961	33,623,173	36,082,932	7.32	23.59	23.59
- Rupiah	28,103,035	32,370,192	34,748,115	7.35	23.65	23.65
- Valas	1,091,926	1,252,981	1,334,816	6.53	22.24	22.24

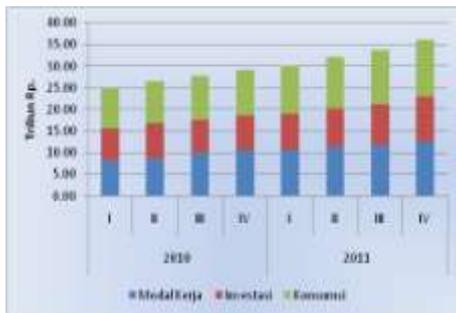
Dari jenis valuta, kredit yang disalurkan oleh bank umum di Riau sebagian besar masih didominasi oleh kredit dalam mata uang Rupiah yakni sebesar Rp34,75 triliun. Penyaluran kredit dalam valuta asing pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,33 triliun dan umumnya didominasi oleh mata uang USD dan SGD. Pada triwulan laporan, baik kredit dalam rupiah maupun valuta asing memiliki pertumbuhan yang relatif sama yakni masing-masing sebesar 23,65% dan 22,24%.

3.3.2. Konsentrasi Kredit

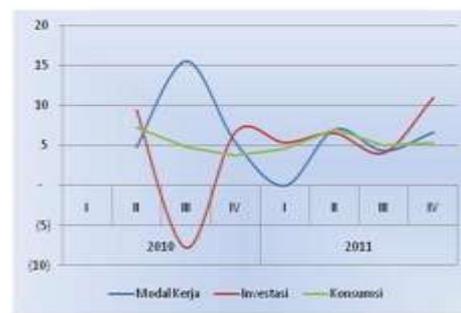
Menurut penggunaannya, kredit yang disalurkan perbankan Riau pada triwulan laporan terbesar disalurkan untuk tujuan konsumsi yakni sebesar Rp13,15 triliun (36,43%), diikuti untuk modal kerja Rp12,73 triliun (35,28%) dan investasi Rp10,21 triliun (28,29%). Namun demikian, kredit investasi memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 29,68% (y-o-y), sementara

kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 18,93% dan 23,78% (y-o-y). Tingginya laju pertumbuhan kredit investasi tersebut tentunya berdampak positif bagi kegiatan perekonomian Riau, sebagaimana terlihat pada sumbangan investasi dalam pembentukan PDRB Riau triwulan IV-2011 yang cukup besar (grafik 3.3 dan grafik 3.4).

Grafik 3.3. Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan

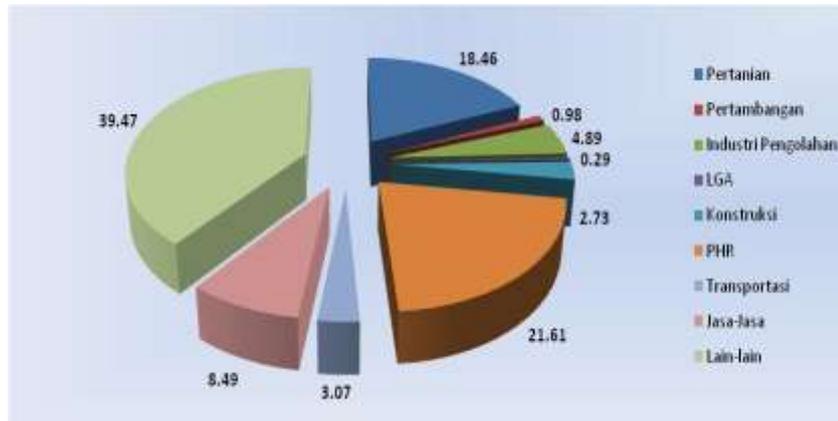


Grafik 3.4. Pertumbuhan (yoy,%) Kredit Menurut Jenis Penggunaan



Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, konsentrasi penyaluran kredit juga relatif tidak berubah dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Kredit yang disalurkan oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan sebagian besar masih ditujukan ke sektor perdagangan dengan pangsa mencapai 21,61%, diikuti oleh sektor pertanian dan industri dengan pangsa masing-masing sebesar 18,46% dan 4,89% pada triwulan laporan. Sementara itu, pada sektor pertanian, kredit yang disalurkan utamanya ditujukan ke sub sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai Rp4,95 triliun. Relatif besarnya penyaluran ke sub sektor tersebut sejalan dengan peran kelapa sawit sebagai komoditas primadona di Provinsi Riau (grafik 3.5).

Grafik 3.5. Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau



Dilihat pertumbuhannya, penyaluran kredit ke sektor pertambangan mencatat kenaikan tertinggi yakni mencapai 147,34% (y-o-y) dengan nominal sebesar Rp355,06 miliar. Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit ke sub sektor jasa pertambangan minyak dan gas bumi dan pertambangan batubara, dimana kredit yang diserap oleh kedua sub sektor tersebut pada triwulan laporan masing masing tercatat sebesar Rp165,08 miliar (46,47%) dan Rp154,90 miliar (43,63%). Hal ini sejalan dengan membaiknya prospek pertambangan non migas khususnya batubara.

Dari aspek spasial, pada triwulan laporan kredit yang disalurkan bank umum di Riau sebagian besar masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dengan nilai mencapai Rp24,59 triliun (68,15%) atau tumbuh 23,52% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi terjadi di Kota Dumai yang tercatat sebesar 42,65%, yang diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu (35,16%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (26,80) (table 3.5). Kondisi ini tidak terlepas dari pesatnya pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Berdasarkan Wilayah di Provinsi Riau
(Dalam Rp. Juta)

Sektor Ekonomi	2010	2011		Growth			Pangsa (%) Trw-IV
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y	
Kab. Kampar	1,372,661	1,533,861	1,518,774	(0.98)	10.64	10.64	4.21
Kab. Bengkalis	1,419,932	1,692,757	1,778,535	5.07	25.25	25.25	4.93
Kab. Indragiri Hulu	1,435,102	1,717,411	1,819,717	5.96	26.80	26.80	5.04
Kab. Indragiri Hilir	1,084,941	1,179,861	1,249,607	5.91	15.18	15.18	3.46
Kab. Rokan Hulu	525,024	593,621	709,610	19.54	35.16	35.16	1.97
Kab. Rokan Hilir	687,517	817,447	859,644	5.16	25.04	25.04	2.38
Kab. Pelalawan	451,534	53,110	511,997	864.02	13.39	13.39	1.42
Kab. Siak	621,150	732,629	754,885	3.04	21.53	21.53	2.09
Kab. Kuantan Singingi	607,250	692,623	745,809	7.68	22.82	22.82	2.07
Kota Pekanbaru	19,907,735	23,192,659	24,590,736	6.03	23.52	23.52	68.15
Kota Dumai	1,082,114	1,417,193	1,543,619	8.92	42.65	42.65	4.28

3.3.3. Penyaluran Kredit MKM

Posisi penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh bank umum di Riau pada periode laporan mencapai Rp13,43 triliun sehingga pangsaanya terhadap total kredit perbankan Riau mencapai 37,22%. Kredit kepada sektor UMKM di Provinsi Riau sebagian besar diserap oleh skala usaha kecil dengan nilai kredit sebesar Rp5,45 triliun, diikuti oleh skala menengah dan mikro masing-masing sebesar Rp4,87 triliun dan Rp3,11 triliun.

Tabel 3.6. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau
(Dalam Rp. Juta)

Skala Usaha	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Mikro	2,204,935	2,901,705	3,112,386	7.26	41.16	41.16
Kecil	4,734,668	4,921,351	5,448,902	10.72	15.09	15.09
Menengah	3,176,954	4,440,529	4,868,783	9.64	53.25	53.25
Total UMKM	10,116,558	12,263,585	13,430,070			
NPL UMKM	3.23%	3.12%	2.41%			
Total Kredit	29,194,961	33,623,173	36,082,932	7.32	23.59	23.59
% UMKM Thd Total Kredit	34.65	36.47	37.22	2.05	7.41	7.41

Ket : Konsep UMKM mengikuti UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kredit UMKM yang diberikan seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan produktif yakni modal kerja dan investasi dengan pangsa masing-masing sebesar 68,05% dan 31,95%. Dilihat pertumbuhannya, kredit investasi

memiliki pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 45% (y-o-y), sementara kredit modal kerja hanya tumbuh sebesar 27,69% (y-o-y). Dengan terus meningkatnya penyaluran kredit UMKM tentunya memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembangnya sektor UMKM di provinsi Riau. (tabel 3.7)

Tabel 3.7. Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan
(Dalam Rp. Juta)

Skala Usaha	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Modal Kerja	7,157,707	8,486,006	9,139,751	7.70	27.69	27.69
Investasi	2,958,851	3,777,579	4,290,319	13.57	45.00	45.00
Total	10,116,558	12,263,585	13,430,070	9.51	32.75	32.75

Dilihat dari pangasanya, secara sektoral, kredit UMKM yang disalurkan oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan utamanya diserap ke sektor PHR yakni sebesar Rp6,03 triliun (44,87%) dan sektor pertanian sebesar Rp3,56 triliun (26,51%). Hal ini mencerminkan bahwa UMKM di provinsi Riau sebagian besar bergerak di sector PHR dan Pertanian (tabel 3.8)

Tabel 3.8. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi
(Dalam Rp. juta)

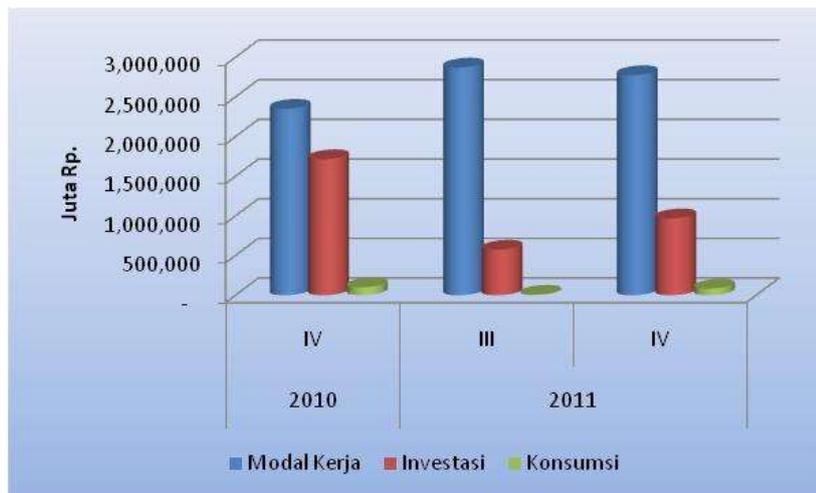
Sektor Ekonomi	2010		2011			
	Nominal	Pangsa (%)	Tw-III		Tw-IV	
			Nominal	Pangsa (%)	Nominal	Pangsa (%)
Pertanian	2,355,378	23.28	2,605,155	21.24	3,559,782	26.51
Pertambangan	21,641	0.21	28,452	0.23	40,231	0.30
Industri Pengolahan	312,255	3.09	359,897	2.93	415,450	3.09
LGA	2,598	0.03	4,738	0.04	7,964	0.06
Konstruksi	377,334	3.73	449,226	3.66	475,643	3.54
PHR	4,504,545	44.53	5,258,761	42.88	6,025,879	44.87
Transportasi	334,908	3.31	519,750	4.24	512,506	3.82
Jasa-Jasa	803,724	7.94	1,158,431	9.45	1,296,335	9.65
Lain-lain	1,404,174	13.88	1,879,175	15.32	1,096,280	8.16
Total	10,116,557	100.00	12,263,585	100.00	13,430,070	100.00

3.3.4. Kelonggaran Tarik

Jumlah kredit yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,83 triliun atau sekitar 13,11% dari total kredit bank umum di Provinsi Riau. Secara triwulanan kredit yang belum dicairkan tersebut meningkat sebesar 10,86% (qtq), sementara secara tahunan turun sebesar 8,14%. Sebagian besar kredit yang belum dicairkan sebagian besar untuk

kredit modal kerja (72,49%), diikuti oleh kredit investasi dan konsumsi masing-masing-masing sebesar 25,32% dan 2,19% (grafik 3.6).

Grafik 3.6. Jumlah Kredit yang Belum Dicairkan Bank Umum di Riau



3.3.5. Risiko Kredit

Risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loans/NPL*¹) yang terdapat di bank umum di Riau masih relatif terjaga. Pada triwulan laporan, NPL bank umum di Riau tercatat sebesar 1,95% menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,39%. Rasio tersebut masih berada dibawah batas kewajaran yang ditetapkan Bank Indonesia yakni sebesar 5%. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh manajemen bank.

Tabel 3.9. Perkembangan NPL Gross di Provinsi Riau

Kolektibilitas	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Lancar	26,620,615	30,969,093	33,472,730	8.08	25.74	25.74
DPK	1,895,221	1,851,730	1,908,305	3.06	0.69	0.69
Kurang Lancar	140,863	125,101	85,112	(31.96)	(39.58)	(39.58)
Diragukan	104,535	193,054	96,923	(49.79)	(7.28)	(7.28)
Macet	433,727	484,195	519,861	7.37	19.86	19.86
NPL (%)	2.33	2.39	1.95			

¹ NPL Gross

3.4. Kondisi Likuiditas

3.4.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan DPK oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan mencapai Rp44,92 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 21,31% (yoy). Kenaikan ini utamanya bersumber dari peningkatan jumlah deposito dan tabungan dengan kenaikan masing-masing sebesar 24,96% dan 21,19% (yoy). Relatif tingginya sumbangan tabungan dan giro pada komponen dana pihak ketiga tersebut mengimplikasikan bahwa struktur dana di Provinsi Riau relatif didominasi oleh dana-dana jangka pendek (table 3.10).

Tabel 3.10. Perkembangan DPK di Provinsi Riau (Rp miliar)

Jenis Simpanan	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Giro	9,198,824	11,567,327	10,837,130	(6.31)	17.81	17.81
Tabungan	18,436,699	20,142,350	22,342,860	10.92	21.19	21.19
Deposito	9,395,063	12,270,578	11,740,115	(4.32)	24.96	24.96
Total	37,030,585	43,980,255	44,920,105	2.14	21.31	21.31

Berdasarkan kepemilikannya, DPK bank umum di provinsi Riau sebagian besar masih ditopang oleh dana milik perorangan yakni sebesar Rp31,22 triliun (69,51%) serta dana milik pemerintah yang mencapai Rp10,61 triliun (16,37%). Secara triwulanan, seluruh komponen kepemilikan dana mengalami kenaikan. Hal ini diperkirakan sejalan dengan meningkatnya realisasi anggaran belanja yang umumnya terjadi pada semester kedua dan meningkatnya penghasilan masyarakat dan pelaku usaha (tabel 3.11).

Tabel 3.11. Perkembangan DPK di Provinsi Riau Menurut Kepemilikan (Dalam Rp juta)

Jenis Simpanan	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Sektor Pemerintah	5,553,583	10,614,199	7,354,203	(30.71)	32.42	32.42
Sektor Swasta	5,166,161	5,046,730	6,340,771	25.64	22.74	22.74
Perseorangan	26,310,840	28,319,326	31,225,131	10.26	18.68	18.68
Total	37,030,585	43,980,255	44,920,105	2.14	21.31	21.31

Penghimpunan DPK menurut Kabupaten/Kota dalam triwulan laporan relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Kota Pekanbaru masih memberikan kontribusi terbesar dengan

jumlah DPK sebesar mencapai Rp27,75 triliun atau sekitar 61,77% dari total DPK, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai masing-masing sebesar 10,52% dan 8,07% (Tabel 3.12).

Tabel 3.12. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau (Dalam Rp. Juta)

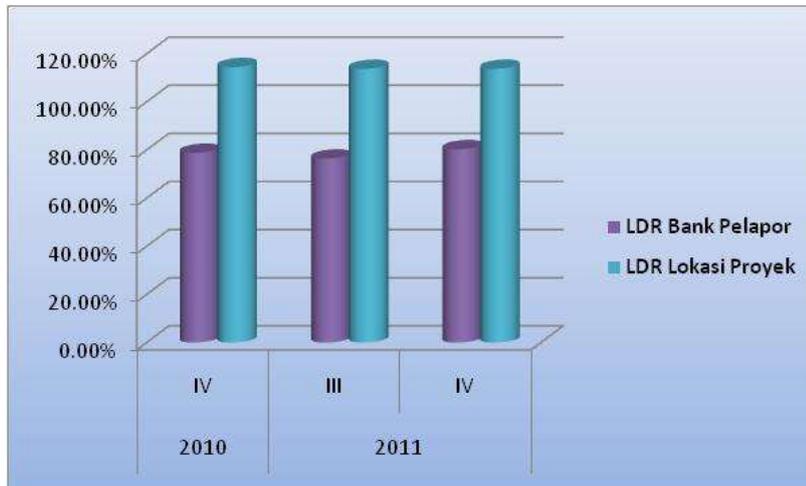
Jenis Simpanan	2010	2011		Growth			Pangsa TW-IV
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y	
Kab. Kampar	1,372,661	1,141,293	1,106,611	(3.04)	(19.38)	(19.38)	2.46
Kab. Bengkalis	1,419,932	4,590,843	4,727,706	2.98	232.95	232.95	10.52
Kab. Indragiri Hulu	1,435,102	1,796,920	1,935,182	7.69	34.85	34.85	4.31
Kab. Indragiri Hilir	1,084,941	1,499,780	1,688,899	12.61	55.67	55.67	3.76
Kab. Rokan Hulu	525,024	373,870	342,983	(8.26)	(34.67)	(34.67)	0.76
Kab. Rokan Hilir	687,517	1,563,042	1,455,000	(6.91)	111.63	111.63	3.24
Kab. Pelalawan	451,534	685,834	590,354	(13.92)	30.74	30.74	1.31
Kab. Siak	621,150	1,131,294	1,076,679	(4.83)	73.34	73.34	2.40
Kab. Kuantan Singingi	607,250	610,473	625,071	2.39	2.93	2.93	1.39
Kota Pekanbaru	19,907,735	26,321,340	27,747,965	5.42	39.38	39.38	61.77
Kota Dumai	1,082,114	3,340,353	3,623,654	8.48	234.87	234.87	8.07
Total	29,194,961	43,055,042	44,920,105	4.33	53.86	53.86	100.00

3.4.2. Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Posisi *LDR* yakni rasio antara penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan Riau pada periode laporan tercatat sebesar 80,33%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 78,84%. Kondisi ini didorong oleh lebih tingginya laju pertumbuhan kredit dibandingkan dengan DPK. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit bank umum mencapai 23,53% (y-o-y), sedangkan pertumbuhan DPK tercatat sebesar 21,31% (y-o-y). Sementara itu, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyek, *LDR* perbankan Riau dalam triwulan laporan mencapai 113,74%, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 114,45% namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan *LDR* nasional yang tercatat 81,00%². (grafik 3.7)

² Data November 2011

Grafik 3.7. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



3.5. Profitabilitas

3.5.1. Suku Bunga Dana dan Kredit

Seiring dengan relatif stabilnya suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI-Rate*) pada level yang cukup rendah dimana pada posisi laporan berada pada level 6%, telah mendorong perbankan Riau untuk menyesuaikan tingkat suku bunga dananya. Suku bunga rata-rata tertimbang simpanan deposito pada triwulan IV-2011 untuk semua jangka waktu mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada deposito jangka 1 bulan, dimana pada trwulan laporan sebelumnya rata-rata tercatat sebesar 7,08% turun menjadi 6,41% (q-t-q). *Trend* penurunan tersebut diharapkan dapat mendorong penurunan suku kredit yang tentunya sangat diharapkan oleh sektor dunia usaha guna membiayai proyeknya (tabel 3.13).

Tabel 3.13 : Perkembangan Suku Bunga Deposito
(Dalam %)

Deposito Jangka Waktu	2010	2011				Growth (%)		
	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
<=1 BULAN	6.46	7.01	7.06	7.08	6.41	-9.46	-0.77	-0.77
<=3 BULAN	6.89	6.82	6.79	6.80	6.67	-1.91	-3.19	-3.19
<=6 BULAN	6.71	6.74	7.00	6.85	6.83	-0.29	1.79	1.79

Penurunan suku bunga yang terjadi pada dana, nampaknya ditindaklanjuti oleh perbankan Riau dengan menurunkan tingkat suku kreditnya. Hal ini terlihat pada menurunnya suku bunga rata-rata tertimbang kredit yang disalurkan baik untuk kredit modal kerja, investasi dan konsumsi. Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan tertinggi terjadi pada suku bunga kredit konsumsi yakni sebesar 2,87% (y-o-y) dari rata-rata sebesar 14.42% menjadi 14.27%, yang diikuti oleh kredit modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 2,64% dan 0,40%.

Dalam upaya meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan, Bank Indonesia secara resmi telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit³. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan disiplin pasar yang lebih baik melalui terbentuknya informasi yang simetris baik di tingkat pelaku usaha maupun perbankan.

Tabel 3.14 : Perlembangan Suku Bunga Kredit
(Dalam %)

Kredit Penggunaan	2010	2011				Growth (%)		
	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
Modal Kerja	14.42	17.12	13.97	14.27	14.04	-1.61	-2.64	-2.64
Investasi	12.57	12.59	12.57	12.65	12.52	-1.03	-0.40	-0.40
Konsumsi	11.84	12.54	11.79	11.67	11.50	-1.46	-2.87	-2.87

3.5.2. Pendapatan dan Beban Bunga

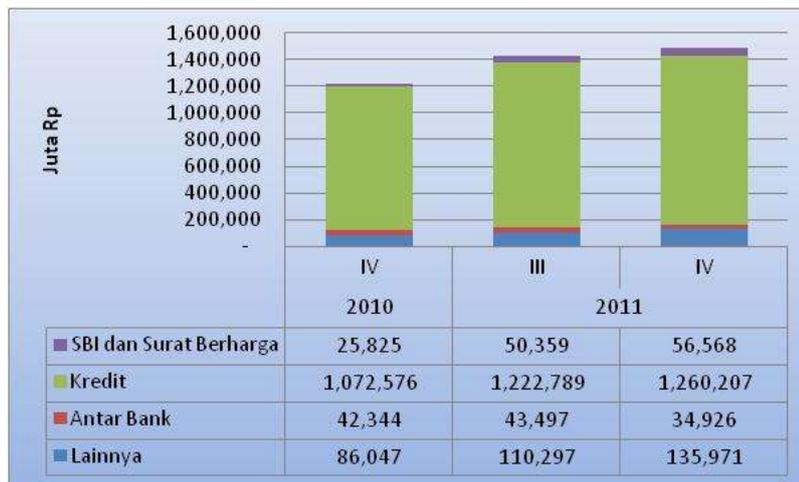
Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh bank umum di provinsi Riau pada triwulan IV-2011 mencapai Rp1,49 triliun atau meningkat 4,26% (qtq). Kenaikan pendapatan utamanya bersumber dari meningkatnya pendapatan bunga kredit seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit. Pada triwulan laporan, pendapatan bunga kredit bank umum tercatat meningkat sebesar 3,06% (q-t-q) menjadi Rp1,26 triliun (grafik 3.8)

Sementara itu, kenaikan beban bunga yang ditanggung oleh bank umum di Riau relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan

³ Sebagaimana diatur dalam SE Ekstern No.13/5/DPNP tanggal 08 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

bunganya. Beban bunga bank umum pada triwulan laporan mencapai Rp558,25 miliar atau naik 1,30% (q-t-q). (grafik 3.9).

Grafik 3.8. Komposisi Pendapatan Bunga



Pada triwulan laporan pendapatan bunga bersih yang diperoleh perbankan Riau sebesar Rp929,42 miliar, meningkat dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2010 yang sebesar Rp404,97 miliar atau tumbuh sebesar 13,09% (y-o-y). Secara kumulatif, meningkatnya pendapatan bunga bersih tersebut tentunya akan mendorong perolehan laba perbankan Riau tahun 2011 (grafik 3.9)

Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga Bersih

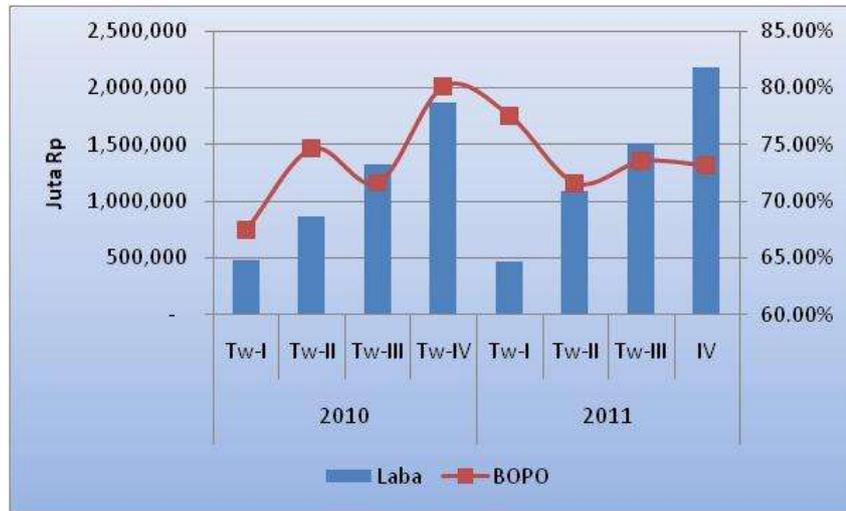


3.5.3. Perkembangan Laba Rugi

Pada triwulan laporan pendapatan operasional tercatat sebesar Rp6,911 triliun, naik 21,78% atau sebesar Rp1,24 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, beban operasional mencapai Rp5,06 triliun, naik 21,18% atau sebesar Rp883,52 miliar. Kenaikan yang terjadi pada komponen pendapatan dimana lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban operasional telah mendorong penurunan rasio BOPO bank umum dari 73,51% pada triwulan III-2011 menjadi 73,14% pada triwulan laporan (grafik 3.10).

Dengan meningkatnya pendapatan operasional serta lebih efisiennya pelaksanaan kegiatan usaha telah mendorong peningkatan laba usaha bank umum di Riau pada triwulan laporan dan mencapai Rp663,32 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp547,90 miliar (q-t-q). Secara kumulatif selama tahun 2011 perbankan Riau telah membukukan laba usaha sebesar Rp2,18 triliun, meningkat sebesar 16,68% dibandingkan perolehan laba selama tahun 2010.

Grafik 3.10. Perkembangan Laba Rugi dan BOPO



4. Perbankan Syariah

Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja perbankan syariah pada triwulan laporan juga terus menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset perbankan syariah di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 mencapai Rp3,25 triliun atau meningkat sebesar 8,11% (qtq) dan 42,81% (yoy). Peningkatan aset tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya DPK yaitu dari Rp2,15 triliun menjadi Rp2,34 triliun atau naik 8,73% (qtq) dan 58,38%. Pertumbuhan DPK tersebut jauh diatas pertumbuhan industri perbankan di Riau yang hanya sebesar 21,28%. Dengan demikian, pangsa aset Perbankan syariah terhadap total perbankan di Provinsi Riau saat ini telah mencapai 5,37% (tabel 3.15).

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah di Provinsi Riau (Rp juta)

Indikator	2010	2011		Growth (%)		
	Tw-IV	Tw-III	Tw-IV	qtq	ytd	YoY
Jumlah Bank	11	11	11	0	0	0
Asset	2,280,240	3,012,003	3,256,336	8.11	42.81	42.81
DPK	1,478,333	2,153,377	2,341,312	8.73	58.38	58.38
- Giro	170,619	331,289	328,209	-0.93	92.36	92.36
- Tabungan	845,354	1,065,587	1,175,950	10.36	39.11	39.11
- Deposito	462,360	756,501	837,153	10.66	81.06	81.06
Pembiayaan	1,594,931	2,207,900	2,290,267	3.73	43.60	43.60
NPF (%)	2.94%	3.04%	2.58%			
FDR (%)	107.89%	102.53%	97.82%			

Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Riau pada triwulan laporan mencapai Rp2,29 triliun atau meningkat sebesar 3,73% (q-t-q) dan 43,60% (y-o-y). Sama halnya dengan pertumbuhan DPK, pertumbuhan pembiayaan tersebut juga jauh di atas pertumbuhan kredit industri perbankan di Riau yang hanya sebesar 23,53%. Lebih tingginya kenaikan DPK dibandingkan dengan kenaikan pembiayaan mengakibatkan FDR Perbankan syariah di Riau relatif menurun dari 102,54% pada triwulan III-2011 menjadi 97,82% pada triwulan laporan. Di sisi lain, risiko pembiayaan bermasalah pada triwulan laporan relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebagaimana terlihat pada menurunnya NPF dari 3,04% menjadi 2,58% (tabel 3.15).

Berdasarkan penggunaan, sebagian pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Provinsi Riau utamanya diserap dalam bentuk pembiayaan konsumsi yang mencapai 42,14% terhadap total pembiayaan, diikuti pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 30,22% dan 27,65%. Pembiayaan konsumsi tercatat meningkat sebesar 6,76% (qtq), dan pembiayaan modal kerja meningkat sebesar 4,673% (qtq) sementara kredit investasi mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 1,49% (qtq).

Sementara itu, secara sektoral, pembiayaan perbankan syariah utamanya ditujukan ke sektor lain-lain serta jasa dunia usaha dengan pangsa masing-masing mencapai 42,01% dan 22,41%. Pembiayaan sektor lain yang juga relatif besar salurkan ke sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa sawit.

5. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sama halnya dengan bank umum, kegiatan usaha BPR/S dalam triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya aset BPR/S, DPK dan kredit yang disalurkan. Aset BPR/S mengalami kenaikan sebesar 5,99% (qtq) menjadi Rp920,40 miliar. Peningkatan aset ini bersumber dari meningkatnya penghimpunan DPK dan kredit masing-masing sebesar 2,91% (qtq) dan 2,75% (qtq) (tabel 3.16).

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Utama BPR/S di Provinsi Riau
(Dalam Rp juta)

Indikator	2010	2011		Growth (%)		
	Tw-IV	Tw-III	Tw-IV	mtm	ytd	yoy
Jumlah BPR	30	30	31			
Aset	755,437	868,416	920,404	5.99%	21.84%	21.84%
DPK	536,516	624,634	642,785	2.91%	19.81%	19.81%
- Giro	-	-	-	-	-	-
- Tabungan	255,808	296,773	302,472	1.92%	18.24%	18.24%
- Deposito	280,708	327,861	340,313	3.80%	21.23%	21.23%
Kredit	515,234	601,015	617,548	2.75%	19.86%	19.86%
NPL	7.98%	8.75%	8.22%			
LDR	96.03%	96.22%	96.07%			

Sementara itu, risiko kredit bermasalah BPR/S mengalami sedikit penurunan yakni dari 8,75% pada triwulan III-2011 menjadi 8,22%. Tingkat NPLs ini sepatutnya menjadi perhatian bagi BPR/S di Riau karena dapat mengakibatkan tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memburuk yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kesehatan bank dan mengganggu fungsi intermediasi bank.

6. Perkembangan Penyaluran KUR

Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh 8 (delapan) bank pelaksanaan KUR di Riau hingga triwulan IV-2011 telah mencapai Rp1,96 triliun, naik 11,65% (qtq) atau berada pada urutan ke-7 dari 33 provinsi dan urutan ke-2 di Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara. KUR yang disalurkan di Riau mencakup sekitar 3,10% dari total penyaluran KUR secara nasional yang

tercatat sebesar Rp63,42 triliun. Adapun jumlah debitur penerima KUR di Provinsi Riau s.d triwulan IV-2011 tercatat sebesar 94.246 debitur. Dengan demikian, rata-rata KUR yang disalurkan menurun 3,82% (qtq) menjadi Rp20,84 juta/jiwa dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp21,66 juta/jiwa(Tabel 3.17).

Tabel 3.17. Perkembangan Penyaluran KUR di Riau
(Dalam Rp. Juta)

Indikator	2010	2011		Growth		
	IV	III	IV	q-t-q	y-t-d	y-o-y
KUR (Rp. Juta)	1,035,437	1,758,759	1,963,716	11.65	89.65	89.65
Jumlah Debitur	58,401	81,187	94,246	16.09	61.38	61.38
Rata-rata (Rp juta/Debitur)	17.730	21.663	20.84	(3.82)	17.52	17.52

Sumber: Kantor Menko Perekonomian

Perkembangan transaksi tunai di Provinsi Riau pada triwulan laporan secara umum relatif menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi utamanya dipengaruhi oleh siklus musiman hari raya besar keagamaan Idul Fitri yang berlangsung setiap tahun. Di sisi lain, penggunaan transaksi non tunai BI-RTGS menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya dari pada volume transaksi.

7. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

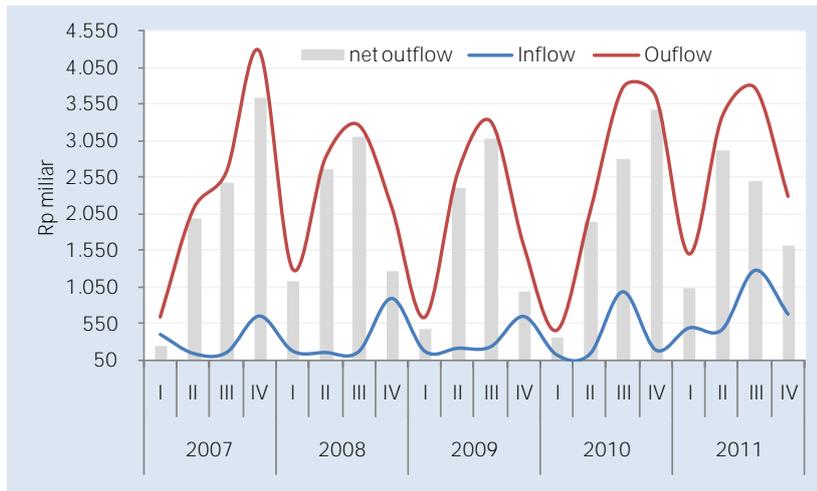
7.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (*Inflow– Outflow*)

Peredaran uang kartal sebagai terlihat dari uang masuk (*inflow*)⁴ dan uang keluar (*outflow*) di Riau pada triwulan laporan secara umum relatif menurun bila dibandingkan dengan triwulan III-2011. Permintaan uang kartal sebagaimana tercermin dari *outflow* Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp2,87 triliun atau turun 39,34% (qtq). Penurunan juga terjadi pada jumlah uang masuk ke Bank Indonesia yang pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp668,20 miliar atau turun 47,39% (qtq). Dengan demikian, pada triwulan laporan, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau masih menunjukkan *net outflow* dengan nilai mencapai Rp1,62 triliun. Secara

⁴ Inflow-outflow adalah uang tunai yang diterima dan dikeluarkan melalui Bank Indonesia Pekanbaru.

umum, penurunan ini merupakan siklus musiman yang terjadi setiap tahun setelah berlangsungnya hari raya Idul Fitri yang pada tahun ini jatuh pada triwulan III-2011.

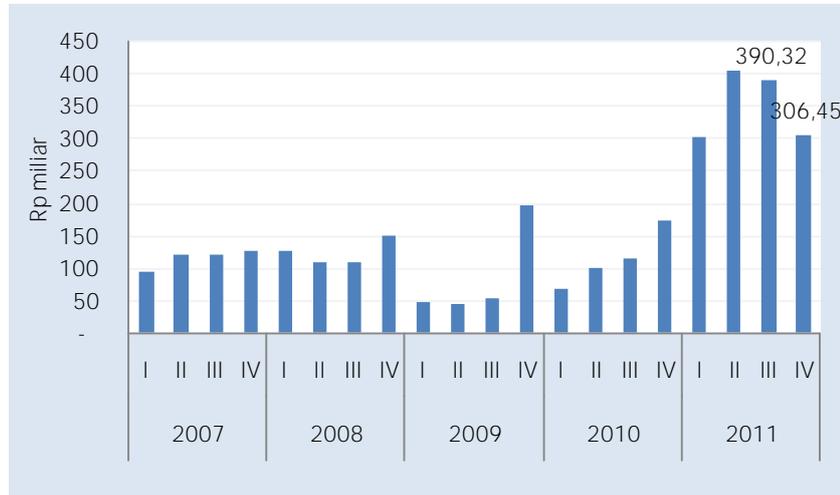
Grafik 3.11. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*



7.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Sejalan dengan upaya pemenuhan jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*Clean Money Policy*) di tingkat masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang dari masyarakat, serta menggantinya dengan uang yang layak edar (*fit for circulation*). Dalam triwulan laporan, jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) di Provinsi Riau mencapai Rp306,45 miliar atau menurun sebesar Rp83,87 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Grafik 3.12. Perkembangan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) di Bank Indonesia Pekanbaru (Rp miliar)

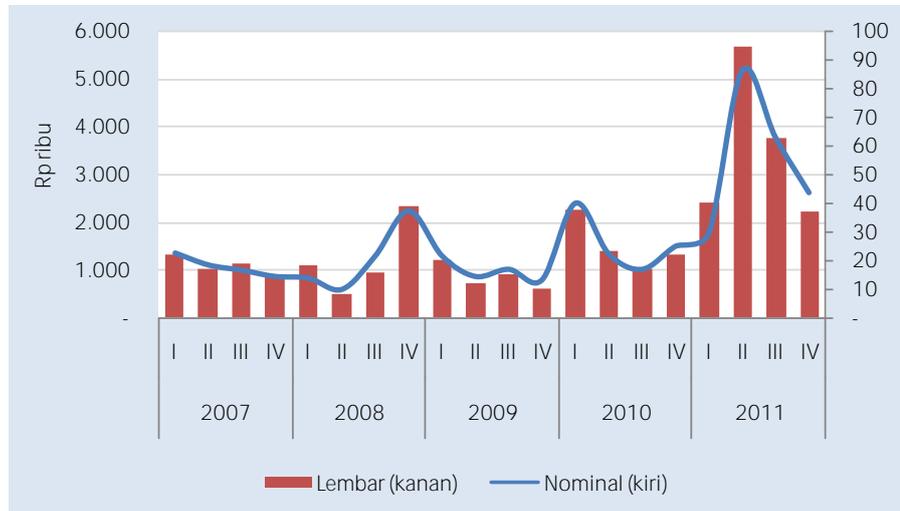


7.3. Uang Palsu

Jumlah dan nilai nominal uang palsu yang ditemukan di Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2011, jumlah uang palsu yang ditemukan tercatat sebanyak 37 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp2,62 juta. Nilai ini turun dibandingkan triwulan II-2011 yang tercatat sebesar Rp3,77 juta.

Uang palsu yang masuk dalam triwulan laporan terdiri dari pecahan Rp100.000 sebanyak 16 lembar, Rp50.000 sebanyak 20 lembar dan sisanya sebanyak 1 lembar merupakan pecahan Rp20.000. Penemuan uang palsu tersebut berdasarkan permintaan klarifikasi dari perbankan dan masyarakat kepada Bank Indonesia Pekanbaru dan sebagian dari hasil setoran perbankan ke Bank Indonesia.

Grafik 3.13. Perkembangan Peredaran Uang Palsu di Riau



Dalam upaya meningkatkan *awareness* masyarakat dalam mengidentifikasi keaslian uang rupiah, Bank Indonesia Pekanbaru secara rutin melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada setiap lapisan masyarakat termasuk kalangan perbankan melalui penerapan prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi bagaimana cara memperlakukan uang secara baik guna memperpanjang usia manfaat fisik dari uang dengan memperkenalkan prinsip 3D Plus (Didapat, Disimpan, Disayang).

8. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

8.1. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transaksi non tunai melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan IV-2011 di Provinsi Riau secara umum menunjukkan kenaikan. Dari sisi nominal, nilai transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 mencapai Rp76,77 triliun atau naik sebesar 17,54% (qtq). Sementara itu, dari sisi volume, jumlah warkat transaksi BI-RTGS di Riau pada triwulan laporan mencapai 27.151 warkat atau naik 345% (qtq). Secara umum, berdasarkan wilayahnya, sebagian transaksi BI-RTGS di Riau utamanya

masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sejalan dengan tingginya geliat aktivitas kegiatan usaha di kota tersebut.

Tabel 3.18. Perkembangan nilai BI-RTGS di Riau Triwulan IV-2011

Jumlah Nominal Kab/Kota	III-2011				IV-2011			
	From	To	From - To	Kumulatif	From	To	From - To	Kumulatif
Bengkalis	215	919	119	1.134	631	1.127	251	1.758
Dumai	2.422	1.714	304	4.136	2.277	1.666	360	3.943
Indragiri Hulu	-	0	-	0	-	1	-	1
Indragiri Hilir	-	1	-	1	0	20	-	20
Kampar	7	385	0	392	8	421	1	429
Kuantan Singingi	-	0	-	0	-	0	-	0
Pekanbaru	34.570	24.404	7.734	58.975	41.040	28.673	11.502	69.713
Pelalawan	0	8	-	8	2	7	1	9
Rokan Hulu	-	1	-	1	-	2	-	2
Rokan Hilir	32	3	-	35	30	3	-	32
Siak	109	524	3	633	228	639	19	867
RIAU	37.355	27.960	8.160	65.315	43.136	31.652	11.945	76.774

Tabel 3.19. Perkembangan Volume Warkat BI-RTGS di Riau Triwulan IV-2011

Jumlah Warkat Kab/Kota	III-2011				IV-2011			
	From	To	From - To	Kumulatif	From	To	From - To	Kumulatif
Bengkalis	1.074	522	106	1.596	1.508	626	233	2.134
Dumai	3	1.937	691	1.940	1.441	1.114	995	2.555
Indragiri Hulu	-	3	-	3	-	4	-	4
Indragiri Hilir	-	6	-	6	3	13	-	16
Kampar	435	154	7	589	471	156	18	627
Kuantan Singingi	-	4	-	4	-	3	-	3
Pekanbaru	23	35	8	58	8.381	11.375	2.750	19.756
Pelalawan	4	48	1	52	3	45	1	48
Rokan Hulu	-	14	-	14	-	20	-	20
Rokan Hilir	856	72	-	928	927	51	-	978
Siak	546	358	26	904	636	374	20	1.010
RIAU	2.941	3.153	839	6.094	13.370	13.781	4.017	27.151

Bab 4

KONDISI KEUANGAN

DAERAH

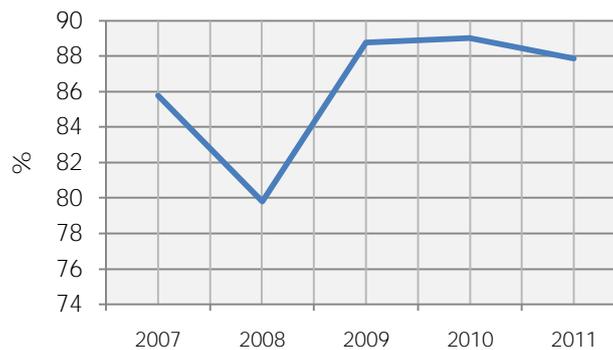
1. Kondisi Umum

Anggaran pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp4,28 triliun, sementara anggaran belanja daerah tercatat sebesar Rp4,79 triliun. Berdasarkan data realisasi belanja daerah per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sampai dengan akhir tahun 2011 total belanja daerah yang dihitung berdasarkan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah terealisasi sebesar Rp4,21 triliun atau 87,89% dari rencana awal. Persentase realisasi belanja terbesar terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni mencapai 97,50%. Sedangkan realisasi terkecil terdapat di Badan Badan Penanggulangan Bencana yaitu sebesar 42,97%.

2. Realisasi Belanja

Anggaran belanja Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat Rp 4,79 triliun, relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 4,27 triliun. Realisasi belanja hingga akhir tahun 2011 mencapai Rp4,21 triliun atau 87,89% dari total anggaran belanja. Sejak tahun 2009, realisasi belanja Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini diindikasikan sebagai dampak dari percepatan pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan persiapan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII di tahun 2012 dan adanya aktivitas pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Grafik 4.1. Realisasi Anggaran Belanja SKPD 2007 – 2010 (Juta Rupiah)



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Riau, diolah

Jika dilihat dari belanja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, plafon belanja terbesar pada tahun 2011 dialokasikan untuk Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (PPKD) yakni sebesar Rp1,32 triliun diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum yang mencapai Rp951,52 miliar atau sekitar 18,96% dari total belanja daerah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum tercatat menjadi SKPD dengan plafond belanja terbesar yakni sekitar 26,15% dari total anggaran. Hal ini sejalan dengan prioritas alokasi anggaran Provinsi Riau dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama menjelang pelaksanaan PON ke-18 di Provinsi Riau.

Dilihat dari komponennya, realisasi belanja tertinggi terdapat pada belanja tidak langsung yaitu sebesar 92,39% atau mencapai Rp1,88 triliun sementara

persentase realisasi untuk belanja langsung sebesar 84,9% dengan nilai nominal mencapai Rp2,48 triliun.

Tabel 4.1. Realisasi Belanja SKPD di Provinsi Riau Triwulan IV-2010

Komponen	Anggaran Belanja Rp miliar	Realisasi (Rp miliar)		Realisasi 2010 (%)
		Rp miliar	%	
Belanja Tidak Langsung	1.879,26	1.736,16	92,39	90,36
Belanja Langsung	2.913,94	2.476,69	84,99	88,23
Total	4.793,20	4.212,85	87,89	89,05

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Riau, diolah

SKPD dengan penyerapan anggaran belanja tertinggi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mencapai Rp19,29 miliar atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp19,79 miliar dengan keseluruhan peruntukan dialokasikan pada belanja tidak langsung. Adapun, realisasi anggaran terkecil terdapat di Badan Penanggulangan Bencana yaitu sebesar 42,97% dari total plafon anggaran sebesar Rp2,12 miliar.

Bab 5

PERKEMBANGAN

KESEJAHTERAAN DAERAH

1. Kondisi Umum

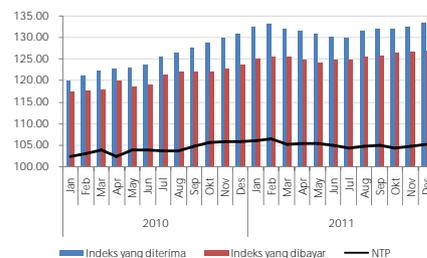
Kondisi kesejahteraan di Provinsi Riau sebagaimana tercermin dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kecenderungan yang membaik. Hal ini seiring dengan semakin cerah perekonomian di Riau. Indeks NTP di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 mencatat pertumbuhan positif secara triwulanan setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Hal ini diindikasikan dipengaruhi oleh meningkatnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) lokal yang tercatat tumbuh meningkat sebesar 0,63% (qtq).

2. Kesejahteraan

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah NTP¹. Indikator ini dibangun dengan mengukur kemampuan tukar dari produk yang dihasilkan oleh petani dengan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP mengindikasikan semakin meningkatnya daya tukar (*term of trade*) petani sehingga tingkat kehidupan petani juga akan mengalami peningkatan.

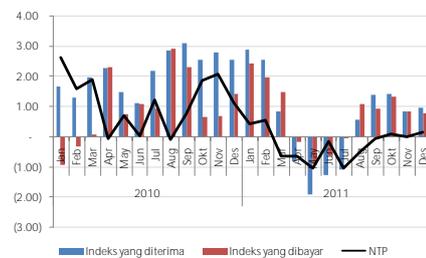
Indeks NTP di Provinsi Riau pada triwulan IV-2011 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya daya tukar petani dari produk yang dihasilkan terhadap produk yang dibutuhkan. Peningkatan ini utamanya terjadi karena lebih kecilnya biaya yang harus dibayar petani dibandingkan dengan hasil yang diterimanya. Kondisi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik 5.1. Perkembangan NTP Provinsi Riau Triwulan IV-2011



Sumber : BPS Provinsi Riau

Grafik 5.2. Pertumbuhan NTP (qtq) Provinsi Riau Triwulan IV 2011



Sumber : BPS Provinsi Riau

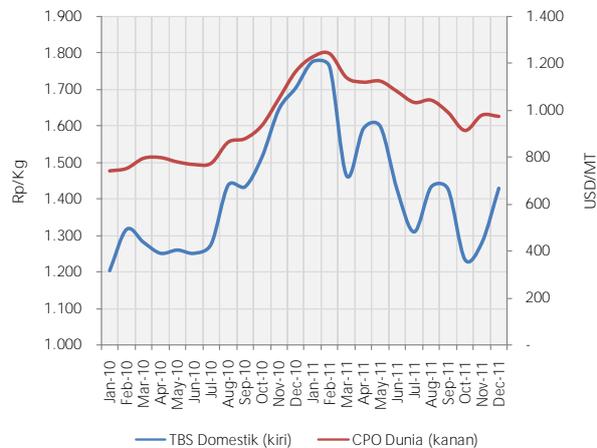
Lebih lanjut, pertumbuhan triwulanan (qtq) NTP Riau selama triwulan laporan (Oktober-Desember) mencatat pertumbuhan positif bila dibandingkan triwulan sebelumnya (Juli-September). Pertumbuhan NTP Riau pada triwulan laporan tercatat tumbuh positif sebesar 0,17% (qtq). Hal ini menunjukkan

¹ NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dan dinyatakan dalam bentuk persentase

perkembangan yang menggembarakan mengingat pada triwulan sebelumnya pertumbuhan NTP mengalami kontraksi (qtq).

Pertumbuhan NTP yang positif ini diindikasikan dipengaruhi oleh membaiknya harga jual TBS lokal di tingkat petani. Selama triwulan laporan, harga TBS lokal rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,63% (qtq), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33% (qtq). Relatif lebih tingginya kenaikan harga TBS lokal diperkirakan akibat terbatasnya pasokan TBS lokal seiring dengan banjir yang terjadi di sentra produksi tanaman perkebunan seperti Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir. Adanya peningkatan ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab relatif meningkatnya daya beli petani secara umum mengingat sebagian besar penduduk Riau utamanya bekerja pada sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan.

Grafik 5.3. Perkembangan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Lokal di Provinsi Riau



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Bloomberg

Bab 6

PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

1. PROSPEK MAKRO REGIONAL

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan I-2012 diperkirakan akan relatif melambat meskipun berada pada tingkat yang relatif moderat. Kondisi ini diindikasikan akan dipengaruhi oleh terbatasnya produksi tanaman perkebunan¹ dan prakiraan kenaikan curah hujan yang berpotensi menghambat distribusi pasokan bahan baku khususnya pada sektor industri pengolahan kelapa sawit.

¹ Berdasarkan hasil liason kepada pelaku usaha, diketahui bahwa siklus produksi tanaman kelapa sawit utamanya terjadi pada periode pertengahan hingga akhir tahun.

Secara tahunan, dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2012 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,3%-4,50%. Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi yakni berkisar 7,3%-7,5%.

Tabel 6.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2011

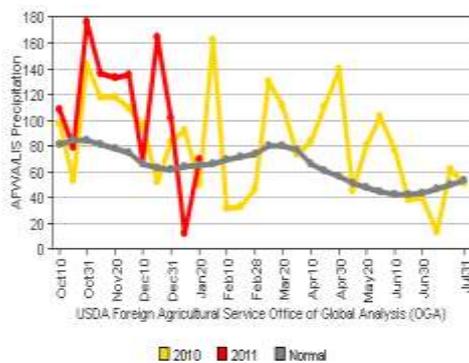
Pertumbuhan	2010***				2011***				2012
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	lp)
Total	2,90	3,77	4,76	5,22	4,04	3,44	3,93	4,63	4,3 - 4,5
Tanpa Migas	6,01	6,75	7,95	7,84	7,51	7,54	7,64	7,40	7,3 -7,5

Sumber : BPS Provinsi Riau

Keterangan :***) Angka Sangat Sementara, p) Perkiraan Bank Indonesia

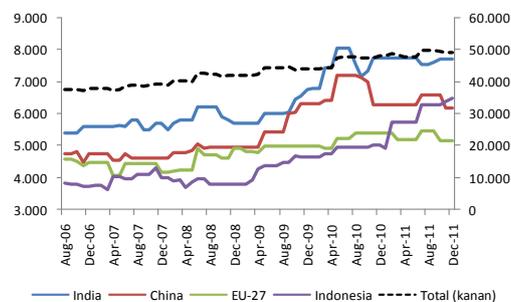
Dari sisi penggunaan, kondisi ini bersumber dari melambatnya daya beli masyarakat sejalan dengan adanya tekanan inflasi khususnya dalam dua bulan pertama triwulan I-2012. Berdasarkan hasil survei², diketahui bahwa terdapat peningkatan ekspektasi inflasi di tingkat konsumen dalam 3 bulan mendatang sejalan dengan faktor tingginya curah hujan yang diindikasikan akan mengakibatkan kegagalan panen bahan makanan di sentra produksi utama.

Grafik 6.1. Perkembangan Curah Hujan di Provinsi Riau



Sumber : US Department of Agriculture

Grafik 6.2. Trend Konsumsi CPO di beberapa negara



Sumber : US Department of Agriculture

Meskipun demikian, pertumbuhan triwulan mendatang dipandang masih cukup kondusif sejalan dengan kebutuhan komoditas ekspor Riau (terutama CPO) di negara mitra dagang utama yang dapat berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan eksternal. Disamping dipengaruhi oleh beberapa kondisi tersebut,

² Survei Konsumen BI bulan Januari 2012

relatif stabilnya bea keluar ekspor CPO diperkirakan akan mengakibatkan cukup kompetitifnya daya saing ekspor CPO riau di pasar internasional³.

Sementara, dari sisi sektoral, sektor bangunan dan sektor perdagangan diindikasikan akan menjadi motor penggerak perekonomian Riau pada triwulan mendatang sejalan dengan masih berlangsungnya percepatan pembangunan infrastruktur PON. Sedangkan, pada sektor utama, khususnya sektor pertanian diperkirakan berpotensi tumbuh melambat pertumbuhan triwulan mendatang seiring dengan meningkatnya tingkat curah hujan pada triwulan mendatang yang dapat menghambat pasokan bahan baku ke sektor industri pengolahan non migas.

Beberapa hal yang berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi Riau mencapai batas atas proyeksi (*upside risks*) antara lain insentif pemerintah melalui restrukturisasi bea keluar ekspor MSM serta meningkatnya APBD yang secara signifikan dapat memberi efek *multiplier* terhadap ekonomi melalui porsi belanja modal.

2. PERKIRAAN INFLASI

Perkembangan inflasi tahunan Kota Pekanbaru pada triwulan mendatang diproyeksikan berada pada kisaran 4,10% - 4,40% (yoy). Sedangkan secara triwulanan, inflasi diperkirakan berkisar 0,60% - 0,80% (qtq). Kondisi ini diindikasikan bersumber dari meningkatnya prakiraan harga bahan pangan strategis khususnya beras sejalan dengan gangguan cuaca yang berpotensi mengakibatkan produksi tidak optimal disamping belum masuknya siklus musiman panen gabah pada sentra produksi utama.

Tabel 6.2. Perkembangan Inflasi Aktual dan Prakiraan Inflasi Triwulan IV-2011

Inflasi	2010***				2011***				2012
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Ip)
yoy,%	2,26	4,58	4,72	7,00	7,76	5,61	6,10	5,09	4,1 - 4,4
qtq,%	0,79	1,72	1,83	2,48	1,51	-0,30	2,30	1,50	0,6 - 0,8

Sumber : BPS Provinsi Riau,

Keterangan : p) Proyeksi Bank Indonesia

³ Kementerian keuangan telah menetapkan bea keluar ekspor MSM pada bulan Januari tetap sebesar 15%. Sementara, ambang batas atas bea keluar minyak sawit mentah diturunkan menjadi 22,5% dari sebelumnya 25% (Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK011/2011 tentang perubahan atas PMK No.67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK)

Beberapa faktor lain yang diperkirakan akan mempengaruhi tekanan inflasi pada triwulan mendatang antara lain (i) masih kuatnya permintaan domestik sejalan dengan masih berlangsungnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung PON yang akan berlangsung pada bulan September 2012 mendatang, (ii) risiko gangguan distribusi pasokan terkait dengan belum membaiknya kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Riau, (iii) *trend* penguatan harga emas dunia yang berpotensi memberikan tekanan inflasi inti, dan (iv) meningkatnya ekspektasi inflasi di tingkat pedagang akibat gangguan produksi bahan pangan strategis pada sentra produksi utama.

Mewujudkan Keseimbangan yang Efisien Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan¹

*Kebijakan Bank Indonesia yang Telah Dilaksanakan pada tahun 2011
dan akan dijalankan pada tahun 2012*

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin kompleks dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Kejutan eksternal dan ketidakpastian seakan-akan adalah sebuah dimensi konstan yang terus menerus mengikuti dan setiap perumusan serta implementasi kebijakan ekonomi akan berhadapan dengan “kepastian dan ketidakpastian”. Sementara itu, tantangan lain yang perlu dihadapi saat ini adalah mengatasi berbagai penyakit “inefisiensi” yang telah mengontrol perekonomian Indonesia secara menahun sehingga menghambat ekonomi untuk tumbuh tinggi dan berkesinambungan.

Di tengah berbagai ketidakpastian yang mewarnai tahun 2011, perekonomian Indonesia masih relatif cukup kuat meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat atas terjadinya krisis ekonomi global yang disebabkan problem fiskal di Eropa dan Amerika yang merembet ke krisis sektor keuangan dan perdagangan internasional. Kuatnya ekonomi nasional tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2011 yang diperkirakan dapat mencapai sebesar 6,5%, dan masih berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan negara lain. Di sisi inflasi, pergerakan inflasi nasional terus menunjukkan trend melambat, bahkan pada akhir tahun 2011 inflasi berada dibawah target sebesar $5\% \pm 1\%$.

Bank Indonesia memandang bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terdapat dua pra-kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, adanya elemen kontinuitas berupa lingkungan makroekonomi yang kondusif. Kedua, adanya pertumbuhan akumulasi kapital dan produktivitas (*total factor productivity*) sebagai elemen struktural agar perekonomian dapat meningkatkan kapasitasnya dan berdaya saing. Pertambahan akumulasi kapital dapat tercapai melalui peningkatan investasi, baik berupa mesin, bangunan pabrik, termasuk juga investasi yang bersifat *intangible* seperti riset dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

¹ Disarikan dari Pidato Gubernur Bank Indonesia pada acara Bankers Dinners tanggal 16 Desember 2011

Keberlangsungan kegiatan investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ekspektasi keuntungan, iklim investasi, dan yang tak kalah penting adalah ketersediaan pembiayaan. Untuk Indonesia, ketersediaan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menghambat (*binding constraint*) kegiatan investasi di dunia usaha. Hal ini terekam dalam beberapa hasil survei Bank Indonesia seperti Survei Pemetaan Sektor Ekonomi di Industri Nonmigas, serta Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) serta program liaison yang mengungkapkan adanya kendala pembiayaan oleh dunia usaha terkait kesulitan dalam mengakses kredit ke bank, yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit, ketersediaan jaminan, dan persyaratan kredit yang terlalu rumit. Masyarakat juga mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara efektif dan efisien dalam pembiayaan perekonomian.

Dalam menyikapi dinamika perekonomian nasional beberapa langkah kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia (BI) telah dilakukan. Di bidang moneter, kebijakan BI selama tahun 2011 pada dasarnya merupakan penguatan dari bauran kebijakan yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya, namun "dikalibrasi" sesuai dengan dinamika tantangan ekonomi yang dihadapi selama tahun 2011. Kebijakan suku bunga tetap diarahkan agar konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu $5\% \pm 1\%$ dan $4,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2011 dan 2012. Sejak September 2011, stance kebijakan moneter mulai memberikan sinyal kuat memasuki fase longgar, dengan diturunkannya batas bawah koridor suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) O/N dari 100 bps menjadi 150 bps. Selanjutnya, pada Oktober dan November 2011 BI menurunkan BI rate masing-masing 25 bps dan 50 bps sehingga BI Rate menjadi 6,0% saat ini. Keputusan tersebut didasari keyakinan kuat bahwa inflasi IHK akan semakin rendah, bahkan berpeluang melaju di bawah sasaran $5 \pm 1\%$.

Di sisi lain, BI memandang perekonomian nasional juga harus dipagari dari sumber-sumber instabilitas seperti lalu lintas modal jangka pendek dengan kebijakan manajemen lalu lintas modal. Di samping itu, struktur aliran modal perlu diperbaiki dengan menggesernya ke instrumen yang lebih panjang. Oleh karena itu, pada 13 Mei 2011, masa tahan kepemilikan SBI diperpanjang menjadi 6 bulan (*six month holding period*) dari sebelumnya 1 bulan. Kebijakan ini efektif menghentikan arus masuk modal ke SBI dan menggeser penempatan modal asing ke pasar SBN. Untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola ULN valas, dilakukan pembatasan atas Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Jangka Pendek Bank maksimal 30% dari Modal.

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas nilai tukar dan pendalaman pasar valas, telah dilakukan terobosan kebijakan struktural meskipun tetap dalam koridor rezim devisa bebas (UU No. 24 tahun 1999). Pada September 2011 BI berinisiatif menerbitkan peraturan yang mewajibkan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN) diterima melalui bank devisa di dalam negeri. Kebijakan ini berlaku efektif Januari 2012.

Di sisi inflasi, mempertimbangkan besarnya pengaruh inflasi yang bersumber dari sisi pasokan, BI terus berkoordinasi dengan Pemerintah dengan memberi masukan atas kebijakan stabilisasi harga bahan pangan (*volatile foods*) dan kebijakan meminimalkan dampak kebijakan harga yang diatur pemerintah. BI juga terus

mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di bidang perbankan, selama 2011 BI menempuh empat pilar kebijakan, yaitu: (i) Kebijakan untuk mendorong peran intermediasi perbankan, agar intermediasi dapat berjalan secara lebih efisien dan transparan, serta untuk lebih membuka akses masyarakat kecil terhadap jasa keuangan; (ii) Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan perbankan, agar bank tetap kuat dan sehat dalam menghadapi persaingan, melalui pengelolaan yang lebih transparan dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik; (iii) Kebijakan untuk penguatan fungsi pengawasan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bank, terutama dalam hal kualitas *early warning system*; (iv) Penguatan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan *macroprudential surveillance* yang lebih baik.

Di sisi perbankan syariah, kebijakan pengaturan perbankan syariah selama tahun 2011 masih dalam rangka harmonisasi ketentuan dengan perbankan konvensional, relaksasi ketentuan dan pelaksanaan amanah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa ketentuan yang sudah dikeluarkan antara lain ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), restrukturisasi pembiayaan dan penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

Sementara itu, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan di bidang sistem pembayaran semakin kompleks. Misalnya, tantangan dalam pengembangan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) dan standarisasi E-money. Tantangannya adalah selain terkait teknologi, juga faktor kompetisi antar penyelenggara dalam penyediaan infrastruktur Sistem Pembayaran, yang menyebabkan duplikasi dalam pengembangan infrastruktur, dan ini menimbulkan in-efisiensi.

Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan dari luar negeri yang akan semakin menguat intensitasnya adalah terkait risiko kerentanan pemulihan ekonomi global, yang dapat lebih buruk dari perkiraan awal (*downside risk*). Ini mengingat kompleksitas krisis yang dihadapi Eropa dari jeratan utang, dapat cukup berpengaruh terhadap ekonomi global. Dengan potret buram global tersebut, mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergantung pada efektivitas daya serap sumber-sumber pertumbuhan domestik dan kemampuan memanfaatkan pasar domestik. Terkait hal ini, kemampuan untuk menjaga momentum pertumbuhan akan terbatas bila intermediasi perbankan dan penyerapan belanja fiskal berjalan secara sub-optimal. Di pihak lain, kombinasi antara risiko pemburukan ekonomi global, tingkat suku bunga di negara maju yang sangat rendah, dan akses likuiditas global berpotensi menggerakkan modal portofolio global dengan pola dua arah.

Dari tantangan domestik, Indonesia juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Di pasar keuangan, industri perbankan nasional pasca

krisis 1998 telah jauh lebih tangguh. Namun, kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional masih sub-optimal. Dari hasil survei BI mengenai “pembiayaan perusahaan” (2009) terungkap fakta bahwa pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja hanya 25%, dan untuk investasi hanya 21%. Sebaliknya, dana internal merupakan sumber utama pembiayaan perusahaan, yaitu 61% untuk investasi dan 48% untuk modal kerja. Ekses likuiditas yang terjadi di perbankan oleh bank ditempatkan dalam instrument moneter dan Surat Bendahara Negara (SBN). Ekses likuiditas tersebut juga menjadi fakta hubungan yang masih merenggang (*decoupling*) antara sektor perbankan dan sektor riil. Di sisi lain, tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah telah memberikan kontribusi pada penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Sebagai perbandingan, di Malaysia dan Philipina dengan suku bunga kebijakan masing-masing pada tingkat 3,0% dan 4,5% (Reverse Repo), tingkat suku bunga kredit bank hanya 6,5% dan 5,7% (Oktober 2011).

Dengan memperhatikan tantangan tersebut arah kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2012 akan ditujukan dalam rangka (a) Mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global; (b) Meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan; (c) Meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan keamanan sistem pembayaran, baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri; (d) Memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam manajemen pencegahan dan penanganan krisis (PMK); (e) Mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat.

Pada tahun 2012, kebijakan moneter akan diarahkan dalam rangka melanjutkan stabilisasi di sektor keuangan serta menjangkar BI Rate yang konsisten dengan upaya mengoptimalkan stimulus pada perekonomian, namun dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran inflasi. Respon suku bunga akan diarahkan agar konsisten untuk pencapaian sasaran inflasi IHK sebesar 4,5 persen \pm 1 persen pada tahun 2012 dan 2013, sekaligus untuk menjaga momentum penguatan ekonomi dan memitigasi risiko dari perlambatan ekonomi global. Kebijakan suku bunga ini akan dilengkapi dengan kebijakan makro prudensial, untuk memitigasi risiko kerentanan pada sektor-sektor konsumtif yang pertumbuhannya tidak *sustainable* atau berpotensi mengalami pengelembungan harga aset (*asset bubble*).

Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah. Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) akan dilanjutkan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Sebagai tindak lanjut dari sisi pengawasan bank, akan ditingkatkan *enforcement* ketentuan dengan mewajibkan Rencana Bisnis Bank (RBB) mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar. BI juga tengah “mengkaji” praktek pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga

(DPK) di atas tingkat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta mengkaji pembatasan pemberian hadiah bagi nasabah. Kebijakan penguatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan permodalan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan danantisipasi perubahan siklus bisnis. Melalui kebijakan ini perbankan Indonesia akan lebih siap dalam mengantisipasi berbagai risiko karena dapat di-cover dengan permodalan yang mencukupi. Di sisi konsumen, aspek perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan juga merupakan dua aspek yang akan memperoleh perhatian, khususnya akibat terjadinya beberapa kasus *fraud* di perbankan. Untuk peningkatan kualitas tata kelola perbankan, akan disempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan, khususnya yang terkait laporan keuangan publikasi, dan pengaturan terhadap akuntan publik yang digunakan oleh perbankan. BI juga terus mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan kebijakan *multi-license* seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

DAFTAR ISTILAH**Aktiva Produktif**

Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

Kualitas Kredit

Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi *Administered Price*

Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan bakar).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat and permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

Inflasi *Volatile Food*

Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya beras).

Kliring

Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaraan kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kliring Kredit

Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito).

Net Interest Income (NII)

Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.

Non Core Deposit (NCD)

Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)

Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Adalah rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ysb.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) – Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit

Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.